

# KETENAGAKERJAAN DALAM DATA



edisi 1

# 2024



# **KETENAGAKERJAAN DALAM DATA**

## **EDISI 1 TAHUN 2024**

ISBN : 978 – 623 – 97099 – 1 – 7

Naskah :  
Bidang Pengelolaan Data Ketenagakerjaan

Desain Sampul dan Layout :  
Bidang Pengelolaan Data Ketenagakerjaan

Penerbit:  
Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan

Redaksi :  
Jl. Jenderal Gatot Subroto  
Kav. 51 Jakarta Selatan 12950  
Telp : 021 – 5273609  
Fax. : 021 – 5273609  
Website : <https://satudata.kemnaker.go.id>  
Email : [pusdatik@kemnaker.go.id](mailto:pusdatik@kemnaker.go.id)

Hak cipta dilindungi undang – undang  
Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau  
menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin  
tertulis dari Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan

## TIM PENYUSUN

Editor : Zulfiyandi, S,E  
Franciscus Anton Wirawan, S.Si., M.Si

Penulis : Zulfiyandi, S,E  
Roselina Yolanda, S.Si  
Ainul Fatwa Khoiruroh, S.Si  
M. Zaini, S.Stat  
Devi Andrian, S.Stat  
Khairina Syafitri, S.Kom

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan Buku Ketenagakerjaan Dalam Data (KDD) edisi 1 Tahun 2024 ini. Buku KDD merupakan penyajian data ketenagakerjaan yang dipublikasikan secara semesteran untuk memotret dinamika ketenagakerjaan secara periodik dan berkesinambungan. Publikasi buku KDD dua kali dalam setahun ini juga merupakan upaya Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan dalam memenuhi amanat Pasal 19 ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.15 Tahun 2020 Tentang Satu Data Ketenagakerjaan.

Buku KDD ini menyajikan data ketenagakerjaan umum periode Agustus 2023 dan data ketenagakerjaan khusus periode Desember 2023. Data ketenagakerjaan umum diolah dan bersumber dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Sedangkan data ketenagakerjaan khusus diolah dan bersumber dari hasil kompilasi administratif laporan penyelenggaraan fungsi ketenagakerjaan oleh produsen data ketenagakerjaan, baik internal maupun eksternal Kemnaker dengan periode laporan sampai dengan Bulan Desember 2023.

Penyajian dan Publikasi Buku KDD ini diharapkan dapat dijadikan sumber referensi dalam melihat dan menggambarkan kondisi ketenagakerjaan Indonesia. Semoga buku KDD ini juga dapat memberikan manfaat yang lebih kepada pengguna data ketenagakerjaan baik itu pemerintah, swasta, akademisi dan masyarakat terutama bagi mereka yang tertarik untuk mengetahui lebih dalam kondisi ketenagakerjaan Indonesia.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku KDD ini. Kritik dan saran sangat diharapkan untuk penyusunan buku KDD yang lebih baik pada edisi-edisi selanjutnya.

Jakarta, April 2024

Tim Penyusun



# BAB I

# PENDAHULUAN





## A. Latar Belakang

Kompleksitas urusan di bidang ketenagakerjaan menuntut akurasi perencanaan, evaluasi serta pengambilan keputusan dan kebijakan dalam pelaksanaan. Karena itu, sangat penting bagi kita menerapkan budaya literasi data dalam setiap pengambilan keputusan dan kebijakan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan ketenagakerjaan.

Budaya literasi data adalah budaya yang terkait dengan kemampuan membaca, menganalisis dan membuat konklusi berpikir berdasarkan data yang ada. Budaya yang menghendaki keterukuran yang *fact-based* atau berdasarkan data dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengkritisi setiap keputusan yang diambil.

Syarat mutlak yang harus dipenuhi agar budaya literasi data dapat diterapkan dalam pembangunan ketenagakerjaan yakni adanya dukungan ketersediaan data ketenagakerjaan yang berkualitas, yaitu akurat, relevan, up to date, lengkap, dan terpadu. Data ketenagakerjaan yang berkualitas menjadi sangat penting karena data sejatinya merepresentasikan fakta atau keadaan yang sebenarnya dari suatu kejadian.

Data dapat diolah menjadi informasi yang memberikan pengetahuan, dan jika disajikan secara periodik dan berkala maka akan didapatkan gambaran historis atau sejarah dari suatu fakta. Yang tentu saja akan sangat penting dan berguna untuk pengampilan kebijakan dan keputusan dalam membuat suatu perencanaan pembangunan ketenagakerjaan, mengawasi pelaksanaan kegiatan pembangunan ketenagakerjaan, serta melakukan evaluasi pembangunan ketenagakerjaan.

Untuk itu, sebagai salah satu upaya dalam menyediakan data ketenagakerjaan yang lengkap dan disajikan secara periodik dan berkala, Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan menyusun dan menerbitkan Buku Ketenagakerjaan Dalam Data (KDD).

## **B. Tujuan**

Buku Ketenagakerjaan Dalam Data disusun dan disajikan dengan tujuan untuk:

- a. Menyediakan data dan informasi ketenagakerjaan yang relevan, komprehensif, berkualitas, dan terbaru (up to date) secara periodik dan berkala.
- b. Sumber referensi pengambilan kebijakan dan keputusan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan bidang ketenagakerjaan.
- c. Melaksanakan amanat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.15 tahun 2020 Tentang Satu Data Ketenagakerjaan, khususnya pasal 19 ayat (2) yang menyebutkan “Penyajian Data dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali setahun dan harus dalam bentuk sederhana agar mudah dimengerti.
- d. Sebagai bentuk akuntabilitas dalam pembangunan ketenagakerjaan.

## **C. Metodologi**

### **C.1. Jenis Data**

Secara garis besar, ada dua jenis data yang disajikan dalam buku KDD ini, yaitu:

- 1) Data Ketenagakerjaan Umum, adalah data ketenagakerjaan yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional, dan bersifat makro. Termasuk dalam data jenis ini yaitu: Penduduk Usia Kerja, Angkatan Kerja, Bukan Angkatan Kerja, Penduduk Yang Bekerja, dan Pengangguran Terbuka.
- 2) Data Ketenagakerjaan Khusus, adalah data ketenagakerjaan yang memiliki ciri-ciri sektoral dan bersifat mikro atau khusus dalam arti data tersebut dihasilkan dari proses penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang menangani urusan ketenagakerjaan. Termasuk data dalam jenis ini yaitu data terkait substansi: Pelatihan vokasi dan produktivitas, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, serta pengawasan ketenagakerjaan dan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).

## **C.2. Sumber Data dan Cara Pengumpulan Data**

Sumber data ketenagakerjaan dibedakan menjadi dua sesuai dengan jenis data ketenagakerjaan, yaitu:

- 1) Data Ketenagakerjaan umum bersumber dari data hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Sakernas dilakukan dengan cara pencacahan terhadap sampel terpilih dan diselenggarakan oleh BPS dua kali dalam setahun, yakni periode Agustus dan Periode Agustus. Hasil Sakernas periode Agustus hanya dapat dilakukan estimasi sampai dengan level provinsi dan berita resminya dirilis pada bulan Mei. Sedangkan hasil Sakernas periode Agustus dapat dilakukan estimasi sampai dengan level kabupaten/kota dan berita resminya dirilis pada bulan November. Dalam buku KDD ini, yang digunakan adalah hasil Sakernas Agustus 2023.
- 2) Data ketenagakerjaan khusus bersumber dari produsen data ketenagakerjaan, yaitu unit teknis Kementerian Ketenagakerjaan serta sumber lainnya seperti Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), PMO Kartu Prakerja, maupun organisasi internasional terkait. Data ini dikumpulkan dengan cara kompilasi administrasi produk data – data ketenagakerjaan. Dalam buku KDD edisi ke tujuh ini, secara umum penyajian data dengan titik *cut off* bulan Desember Tahun 2023.

## **C.3. Pengolahan Data**

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan dua tools. Yang pertama, data ketenagakerjaan umum atau data hasil Sakernas Agustus 2023 diolah menggunakan paket program IBM SPSS Statistics. Sedangkan data ketenagakerjaan khusus yang berupa produk kompilasi administratif diolah dengan menggunakan paket program Microsoft Excel.

## **C.4. Analisis Data**

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode statistik deskriptif. Ini adalah metode statistik yang berhubungan dengan aktivitas penghimpunan, penataan, peringkasan, dan penyajian data dengan maksud agar data menjadi lebih bermakna, mudah dibaca, dan mudah dipahami oleh pengguna. Melalui metode ini, data

ketenagakerjaan yang sudah terkumpul dideskripsikan atau dibuat gambaran umum tentang karakteristiknya. Ukuran-ukuran yang dapat disajikan dengan metode statistik deskriptif ini berupa frekuensi, pemusatan data, penyebaran data, kecenderungan suatu gugus data, dan lain-lain. Agar lebih mudah dibaca dan dipahami, maka data diringkas dalam bentuk tabulasi dan/atau grafik/diagram.

### **C.5. Ukuran Presisi Estimasi**

Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, data ketenagakerjaan umum yang disajikan dalam buku KDD ini merupakan hasil suatu kegiatan survei, yaitu Sakernas. Dalam survei, pendataan atau pencacahan dilakukan terhadap sampel yang sebelumnya dipilih dengan menggunakan metode sampling tertentu. Hasil pencacahan terhadap sampling kemudian digunakan untuk melakukan estimasi terhadap angka populasi.

Oleh karena itu, diperlukan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat presisi suatu estimasi relatif terhadap estimasinya. Dalam hal ini, ukuran yang digunakan adalah Relatif Standar Error (RSE). Kualitas hasil estimasi suatu survei bisa diamati dari RSE yang dihasilkan. Menurut Aryago Mulia dkk (2008), keputusan keakuratan suatu estimasi bisa diamati dari kondisi berikut:

- Nilai  $RSE \leq 25\%$ , hasil estimasi dianggap akurat dan bisa digunakan
- $25\% < \text{nilai RSE} \leq 50\%$ , akurasi hasil estimasi tingkat sedang dan perlu kehati-hatian jika digunakan
- Nilai  $RSE > 50\%$ , hasil estimasi tidak akurat sehingga tidak layak digunakan. Dan harus digabungkan dengan estimasi lain untuk mendapatkan estimasi dengan nilai  $RSE \leq 25\%$

### **D. Ruang Lingkup**

Buku KDD ini merupakan salah satu bentuk penyediaan data ketenagakerjaan dengan format buku dan diterbitkan secara periodik dua kali setahun. Lingkup data yang disajikan mencakup:

- Data Ketenagakerjaan Umum
- Data Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
- Data Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
- Data Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- Data Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3

## E. Definisi Operasional

### a

- Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Ahli K3) : tenaga teknis yang berkeahlian khusus dari luar instansi yang membidangi ketenagakerjaan yang ditunjuk oleh Menteri untuk mengawasi ditaatinya peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di bidang K3  
(Permenaker No.33 tahun 2016)
- Anak : setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun  
(Undang-undang No. 13 Tahun 2003)
- Anak yang bekerja : .anak-anak yang terlibat dalam aktivitas apa saja di dalam proses produksi, sesuai SSN, paling sedikit satu jam dalam periode referensi  
(Konsep ILO)  
.anak-anak umur 15-17 tahun yang masuk dalam kategori penduduk yang bekerja  
(Sakernas Agustus 2019)
- Angkatan Kerja : penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.  
(<http://bps.go.id>)
- Arbiter : seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang berselisih dari daftar arbiter yang ditetapkan oleh Menteri untuk memberikan putusan mengenai perselisihan kepentingan, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase yang putusannya mengikat para pihak dan bersifat final  
(Permenakertrans No.1 Tahun 2014)
- Asosiasi Pengusaha : organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk kepentingan pengusaha  
(Permenakertrans No.1 Tahun 2014)

### B

- Badan : Lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu  
(Undang-undang No. 18 Tahun 2017)
- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) : Badan hukum yang menyelenggarakan program Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia  
(Undang-undang No. 18 Tahun 2017)
- Badan Pusat Statistik (BPS) : Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab kepada Presiden untuk melaksanakan survei atau sensus  
(<https://www.bps.go.id>)

- Bukan Angkatan Kerja (BAK) : Penduduk usia kerja (15 tahun atau lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga, atau melaksanakan kegiatan lainnya  
(<https://www.bps.go.id>)
- Bekerja : Melakukan kegiatan/pekerjaan paling sedikit satu jam berturut-turut selama seminggu yang lalu dengan maksud untuk memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pekerja keluarga yang tidak dibayar
- Bursa Kerja Khusus : termasuk kelompok penduduk yang bekerja  
(<https://www.bps.go.id>)  
Unit pelayanan pada satuan pendidikan menengah, satuan pendidikan tinggi, dan Lembaga pelatihan kerja yang memberikan fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja kepada alumninya.  
(Permenaker No.39 Tahun 2016)
- c**
- Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) : Setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan  
(Undang-undang No. 18 Tahun 2017)
- d**
- Dinas Provinsi : instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di provinsi  
(Permenakertrans No.1 Tahun 2014)
- Dinas Kabupaten/Kota : instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota  
(Permenakertrans No.1 Tahun 2014)
- Data : a. Informasi yang berupa angka tentang karakteristik atau ciri-ciri khusus suatu populasi  
(Permenakertrans No.1 Tahun 2014)  
b. Catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi  
(Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2019)
- Data statistik : Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis  
(Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2019)
- e**
- 
- f**
- Fasilitas kesejahteraan pekerja/buruh : fasilitas kesejahteraan bagi pekerja/buruh yang disediakan oleh perusahaan  
(Permenakertrans No.1 Tahun 2014)

**g**

- Golongan : uraian lebih lanjut dari golongan pokok data dan informasi ketenagakerjaan  
(Permenakertrans No.1 Tahun 2014)
- Golongan Pokok : tingkat pengelompokan yang paling luas dari golongan klasifikasi dari jenis data dan informasi ketenagakerjaan  
(Permenakertrans No.1 Tahun 2014)

**h**

- Hubungan Kerja : Hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah (Undang-undang No. 13 Tahun 2003)
- Hubungan Industrial : suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
(Undang-undang No. 13 Tahun 2003)
- Hakim Ad-Hoc : Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung yang pengangkatannya atas usul serikat pekerja/serikat buruh atau organisasi pengusaha  
(Permenakertrans No.1 Tahun 2014)

**i**

- Instruktur : Seseorang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pelatihan dan pembelajaran kepada peserta pelatihan di bidang atau kejuruan tertentu  
(Permenakertrans No.1 Tahun 2014)
- Iuran : Sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta dan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan  
(<https://bpjsketenagakerjaan.go.id>)

**j**

- Jumlah jam kerja seluruh pekerjaan seminggu yang lalu : Jumlah kerja mereka yang bekerja (tidak termasuk jam kerja istirahat resmi dan jam kerja yang digunakan untuk hal-hal di luar pekerjaan) selama seminggu yang lalu. Klasifikasi jumlah jam kerja seluruh pekerjaan seminggu yang lalu dibagi menjadi 0 (sementara tidak bekerja, 1-34 jam, 35 -40 jam (Jam kerja normative berdasarkan UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu 40 jam per minggu), 41 – 48 jam, > 48 jam (ambang batas untuk mengklasifikasikan jam kerja berlebih menurut Konvensi ILO 1919 (No.1) dan 1930 (No.30))  
(<https://www.bps.go.id>)

- Jenis Pekerjaan/Jabatan : Macam pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau ditugaskan kepada seseorang yang sedang bekerja atau sementara tidak bekerja  
(Permenakertrans No.1 Tahun 2014)
- Jaminan Hari Tua (JHT) : manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap  
(<https://bpjsketenagakerjaan.go.id>)
- Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) : manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja  
(<https://bpjsketenagakerjaan.go.id>)
- Jaminan Kematian (JK) : manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja  
(<https://bpjsketenagakerjaan.go.id>)
- Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) : Program jaminan kesehatan yang diselenggarakan secara nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.  
(Peraturan Dewan Jaminan Sosial Nasional No. 1 Tahun 2016)
- Jaminan Pensiun (JP) : jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia  
(<https://bpjsketenagakerjaan.go.id>)
- Jaminan sosial : salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak  
(<https://bpjsketenagakerjaan.go.id>)

## **k**

- Karakteristik Data Ketenagakerjaan : Ciri-ciri khusus yang melekat pada data ketenagakerjaan menurut substansinya  
(Permenakertrans No.1 Tahun 2014)
- Kartu Prakerja : Program pengembangan kompetensi berupa bantuan biaya yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja ter-PHK atau pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi  
(<https://www.prakerja.go.id>)
- Klasifikasi Data Ketenagakerjaan : pengelompokan data secara sistematis ke dalam golongan pokok, golongan, sub golongan dan kelompok berdasarkan substansi ketenagakerjaan sehingga terdefinisikan dengan
- Klaim : jelas  
(Permenakertrans No.1 Tahun 2014)  
tuntutan pengakuan atas suatu fakta seseorang berhak atas sesuatu
- Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) : segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan Tenaga Kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja  
(Permenaker No.33 tahun 2016)



- Kompetensi kerja : kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan  
(*Undang-undang No.13 Tahun 2003*)
- Kecelakaan Kerja : Kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang kerumah melalui jalan biasa atau wajar dilalui
- Kesejahteraan Buruh/Pegawai : suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat  
(*Undang-undang No.13 Tahun 2003*)
- Ketenagakerjaan : Segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja  
(*Undang-undang No. 13 Tahun 2003*)
- Konsiliator : Seorang atau lebih yang memenuhi syarat-syarat sebagai konsiliator ditetapkan oleh Menteri, yang bertugas melakukan konsiliasi dan wajib memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan  
(*Permenakertrans No.1 Tahun 2014*)
- 
- Lanjut Usia : Seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas  
(*Undang-undang No. 13 Tahun 1998*)
- Lembaga Pelatihan Kerja : Instansi pemerintah, badan, atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja  
(*Permenaker No. 17 Tahun 2016*)
- Lapangan Usaha : bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/ perusahaan/kantor tempat seseorang bekerja  
(*Permenakertrans No.1 Tahun 2014*)
- Lembaga Kerja Sama Bipartit : forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh yang sudah tercatat di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh  
(*Undang-undang No. 13 Tahun 2003*)
- Lembaga kerja sama tripartite : Forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah  
(*Undang-undang No. 13 Tahun 2003*)
- Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta :

Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga	Lembaga berbadan hukum yang telah memperoleh izin tertulis untuk menyelenggarakan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dalam negeri <i>(Permenaker No.39 Tahun 2016)</i>
	Badan usaha yang telah mendapat izin tertulis dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk merekrut dan menyalurkan pekerja rumah tangga <i>(Permenaker No.2 Tahun 2015)</i>
<b>m</b>	
Mogok Kerja	: Tindakan pekerja/buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau oleh serikat pekerja/serikat buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan <i>(Undang-undang No. 13 Tahun 2003)</i>
Mediator	: pegawai instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang memenuhi syarat-syarat sebagai mediator yang ditetapkan oleh Menteri untuk bertugas melakukan mediasi dan mempunyai kewajiban memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan <i>(Permenakertrans No.1 Tahun 2014)</i>
<b>n</b>	
Notifikasi	: Persetujuan penggunaan TKA yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja sebagai dasar penerbitan Itas <i>(Permenaker No. 10 Tahun 2018)</i>
<b>o</b>	
-	
<b>p</b>	
Padat Karya	: Kegiatan pemberdayaan masyarakat marginal/miskin yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi local dalam rangka mengurangi pengangguran dan kemiskinan, meningkatkan pendapatan serta mempertahankan daya beli masyarakat
Pekerja/Buruh	: Setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain <i>(Undang-undang No. 13 Tahun 2003)</i>
Pekerjaan Layak	: Kondisi pekerjaan yang memenuhi aspirasi orang-orang dalam kehidupan kerja, termasuk mengenai peluang pekerjaan yang produktif, pendapatan yang adil, keamanan di tempat kerja, perlindungan sosial bagi keluarga, prospek yang lebih baik untuk pengembangan pribadi dan integrasi sosial, kebebasan untuk mengekspresikan keprihatinan, dan partisipasi dalam membuat keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka, serta mengenai kesetaraan kesempatan dan perlakuan untuk semua wanita dan pria.

		( <a href="https://www.ilo.org/global/topics/decentwork/lang—en/index.htm">https://www.ilo.org/global/topics/decentwork/lang—en/index.htm</a> )
Pekerja Migran Indonesia	:	Setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia (Undang-undang No. 18 Tahun 2017)
Pekerja Informal	:	Pekerjaan diluar hubungan kerja
Pelatihan Kerja	:	Keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan (Undang-undang No. 13 Tahun 2003)
Pelatihan Tanggap Covid-19	:	Program pelatihan yang diarahkan pada kegiatan untuk memproduksi barang yang dibutuhkan masyarakat dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19 seperti pelatihan memasak, pembuatan APD (hazmat), masker, pelindung muka (face shield), hand sanitizer, disinfektan, instalasi wastafel dan pelatihan lainnya. Orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain (Undang-undang No. 13 Tahun 2003)
Pemuda	:	mereka yang berusia 15 – 24 tahun ( <i>International Labour Organization</i> )
Penduduk Usia Kerja	:	Penduduk berumur 15 tahun ke atas ( <a href="http://bps.go.id">http://bps.go.id</a> )
Penganggur Terbuka	:	Mereka yang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, sudah punya pekerjaan tapi belum mulai bekerja
Pengantar Kerja	:	( <a href="http://bps.go.id">http://bps.go.id</a> ) Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan pelayanan antar kerja ( <i>PermenpanRB No. 5 Tahun 2014</i> )
Pengawasan Ketenagakerjaan	:	Kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan (Undang-undang No. 13 Tahun 2003)
Penyandang Disabilitas	:	Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warge negara lainnya berdasarkan kesamaan hak ( <i>Undang – Undang No.8 Tahun 2016</i> )
Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan	:	Pegawai negeri sipil yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan perundang-undangan ketenagakerjaan yang ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk ( <i>Permenakertrans No.1 Tahun 2014</i> )

Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Khusus	: Pegawai teknis berkeahlian khusus yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi ( <i>Permenakertrans No.1 Tahun 2014</i> )
Penindakan pelanggaran	: serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan dalam mengusut pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan ( <i>Permenakertrans No.1 Tahun 2014</i> )
Pengusaha	: a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. ( <i>Undang-undang No. 13 Tahun 2003</i> )
Penyandang Disabilitas	: Kesulitan/gangguan dalam melihat, mendengar, berjalan/naik tangga, menggunakan/menggerakkan jari/tangan, berbicara dan atau memahami/berkomunikasi dengan orang lain, serta : kesulitan/gangguan lainnya
Perjanjian Kerja	(Kuesioner Survei Angkatan Kerja Nasional) Perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak ( <i>Undang-undang No. 13 Tahun 2003</i> )
Perusahaan	: a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. ( <i>Undang-undang No. 13 Tahun 2003</i> ) Badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari pemerintah pusat untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia ( <i>Peraturan BP2MI No.3 Tahun 2021</i> )
Pemagangan	: Bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu ( <i>Undang-undang No. 13 Tahun 2003</i> )

- Peraturan Perusahaan : Peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan  
(*Undang-undang No. 13 Tahun 2003*)
- Perjanjian kerja Bersama : Perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak  
(*Undang-undang No. 13 Tahun 2003*)
- Perselisihan hubungan industrial : Perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan  
(*Undang-undang No. 13 Tahun 2003*)
- Pemutusan hubungan kerja : Pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha  
(*Undang-undang No. 13 Tahun 2003*)
- Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia : Badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia  
(*Undang-undang No. 18 Tahun 2017*)
- Produktivitas : Rasio antara hasil atau luaran (output) dengan masukan yang dipakai (input)  
(*Permenakertrans No.1 Tahun 2014*)
- Produktivitas Tenaga Kerja : rasio antara produk berupa barang dan jasa dengan tenaga kerja yang digunakan, baik individu maupun kelompok dalam satuan waktu tertentu yang merupakan besaran kontribusi tenaga kerja dalam pembentukan nilai tambah suatu produk dalam proses kegiatan ekonomi  
(*Permenakertrans No.1 Tahun 2014*)

## q

-

## r

- Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) Remitansi : Rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu yang dibuat oleh Pemberi Kerja TKA untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk  
(*Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018*)  
Layanan jasa pengiriman uang yang dilakukan oleh pengirim dari Indonesia kepada penerima di luar negeri maupun sebaliknya

## s

Serikat pekerja/serikat buruh	: Organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya (Undang-undang No. 13 Tahun 2003)
Sub golongan	: Uraian lebih lanjut dari golongan data dan informasi ketenagakerjaan (Permenakertrans No.1 Tahun 2014)
Status pekerjaan	: Kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan ( <a href="http://bps.go.id">http://bps.go.id</a> )
Standardisasi Kompetensi Kerja	: Proses merumuskan, menetapkan, dan menerapkan standar kompetensi kerja (Permenakertrans No.1 Tahun 2014)
Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)	: rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Permenakertrans No.1 Tahun 2014)
<b>t</b>	
Tenaga kerja	: Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat (Undang-undang No. 13 Tahun 2003)
Tenaga kerja asing	: Warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia (Undang-undang No. 13 Tahun 2003)
Tenaga kerja berkeahlian	: Tiga negara yang tergabung dalam IMT-GT yaitu Indonesia, Malaysia dan Thailand menyepakati menggunakan asumsi yang didekati dari jenis pekerjaan untuk mengkatagorikan tenaga kerja berdasarkan skill yang dimiliki. Mereka yang bekerja sebagai Manager, Profesional serta Teknisi dan Asisten Profesional digolongkan sebagai Skilled Labor.
Tenaga Kerja Mandiri Tenaga Kerja Sukarela	: Sementara itu, yang masuk ke dalam kategori <i>Semi-skilled</i> adalah mereka yang memiliki jenis pekerjaan sebagai Tenaga Tata Usaha, Tenaga Usaha Jasa dan Tenaga Penjualan, Pekerja Terampil Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Pekerja Pengolahan, Kerajinan dan YBDI serta Operator dan Perakit Mesin. Untuk <i>Basic-skilled</i> , adalah mereka yang memiliki jenis pekerjaan sebagai Pekerja Kasar. Suatu program kegiatan pengembangan dan perluasan kerja yang dilakukan kepada masyarakat yang telah memiliki embrio usaha secara berkelompok Tenaga kerja yang melakukan pendampingan kegiatan Tenaga Kerja Mandiri terkait dengan perluasan kesempatan kerja

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) : persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja  
(<http://bps.go.id>)

Tenaga Kerja Pendamping : Tenaga kerja Indonesia yang ditunjuk dan dipersiapkan sebagai pendamping dalam rangka alih teknologi dan alih keahlian  
(Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018)

**U**  
Upah : Hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan  
(Undang-undang No. 13 Tahun 2003)

v  
-

**W**  
Wajib lapor ketenagakerjaan : Laporan perusahaan secara tertulis setiap mengangkat, memindahkan, menghentikan, menjalankan kembali tenaga kerja kepada pejabat yang ditunjuk  
(Undang-undang No. 7 Tahun 1981)

**Y**  
-  
**Z**  
-





# **BAB II**

## **DATA BIDANG PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS**



## 1. Data Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang ditetapkan

Tabel 2.1.  
Jumlah SKKNI yang ditetapkan menurut Lapangan Usaha dan Status  
s.d Triwulan IV Tahun 2023

LAPANGAN USAHA	STATUS SKKNI		TOTAL
	BERLAKU	DICABUT	
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	76	8	84
02. Pertambangan dan Penggalian	62	11	73
03. Industri Pengolahan	151	24	175
04. Pengadaan Listrik, Gas	16	7	23
05. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	21	9	30
06. Konstruksi	141	10	151
07. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12	5	17
08. Transportasi dan Pergudangan	27	2	29
09. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7	1	8
10. Informasi dan Komunikasi	44	14	58
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	26	10	36
12. Real Estat	1		1
13. Jasa Perusahaan	193	40	233
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7		7
15. Jasa Pendidikan	10	4	14
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	21		21
17. Jasa Lainnya	101	23	124
<b>Total</b>	<b>916</b>	<b>168</b>	<b>1,084</b>

Sumber: Kemnaker RI, Ditjen. Binalavotas (data per Triwulan IV Tahun 2023) – diolah Pusdatik Kemnaker

## 2. Data Program dan Materi Pelatihan

Tabel 2.2.  
Jumlah Program dan Materi Pelatihan yang masih aktif menurut Kejuruan dan Metode Pelatihan  
s.d Triwulan IV Tahun 2023

KEJURUAN	METODE PELATIHAN			TOTAL
	BLENDED	OFFLINE	ONLINE	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
AGRIBISNIS	4	11	3	18
BABY SITTER	6	5		11
BANGUNAN	35	81	19	135
BISNIS DAN MANAJEMEN	121	106	212	439
CHILD CAREWORKER	2	1		3

DESAIN BATIK	1	19	1	21
ELDERLY CARETAKER	14	5	7	26
FAMILY COOK	-	2		2
FAMILY DRIVER	5	5		10
GARDENER	-	1		1
GARMEN APPAREL	42	132	8	182
HOUSEKEEPING	11	12	6	29
INDUSTRI KREATIF	6	65	13	84
METODOLOGI PELATIHAN	3	4	5	12
PARIWISATA	89	164	51	304
PENGEMBANGAN SOSIAL MASYARAKAT	1			1
PENGOLAHAN KULIT	-	1		1
PERIKANAN	11	26	17	54
PERTANIAN	31	64	1	96
PROCESSING	16	63	7	86
PRODUKTIVITAS	17	6	9	32
REFRIGERATION	20	32		52
TATA BOGA	8	9	10	27
TATA BUSANA	38	18	10	66
TATA KECANTIKAN	70	97	39	206
TEKNIK ELEKTRONIKA	35	48	3	86
TEKNIK LAS	52	108		160
TEKNIK LISTRIK	19	46	8	73
TEKNIK MANUFAKTUR	20	52	11	83
TEKNIK OTOMOTIF	37	110	52	199
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	188	204	406	798
<b>Tidak Teridentifikasi</b>	<b>61</b>	<b>48</b>	<b>59</b>	<b>168</b>
<b>Total</b>	<b>963</b>	<b>1,545</b>	<b>957</b>	<b>3,465</b>

Sumber: Kemnaker RI, Ditjen. Binalavotas (data per Triwulan IV Tahun 2023) – diolah Pusdatik Kemnaker

### 3. Data Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)

Tabel 2.3.  
Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja menurut Provinsi dan Tipe Lembaga  
s.d Semester II Tahun 2023\*\*\*

PROVINSI	TIPE LEMBAGA							Tidak Teridentifikasi	TOTAL
	BLK KOMUNITAS	BLK UPTD	UPT BPVP	BLKLN	LEMBAGA PELATIHAN K/L	LPK SWASTA	SKPD		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
ACEH	81	14	1		3	170	1	1	271
SUMATERA UTARA	126	15	1	4	15	548	1	2	712
SUMATERA BARAT	92	14	3	1	5	183	1	3	302
RIAU	53	8		2	3	120			186
JAMBI	97	10			2	115	1	2	227
SUMATERA SELATAN	84	13			6	167	1		271
BENGKULU	19	7			2	81			109
LAMPUNG	114	6		3	5	251		1	380
KEP. BANGKA BELITUNG	14	2	1		1	27	2		47
KEP. RIAU	2	2				99	1	3	107
DKI JAKARTA	18	12		17	11	416		40	514
JAWA BARAT	840	22	5	86	52	1,545	3	19	2,572
JAWA TENGAH	743	40	3	81	27	1,006	2	4	1,906
DI YOGYAKARTA	61	5		1	5	205		4	281
JAWA TIMUR	843	30	4	59	23	995	3	11	1,968
BANTEN	158	7	1	4	20	350	1	9	550
BALI	23	7		2	7	299			338
NUSA TENGGARA BARAT	94	11	1	4	5	258			373
NUSA TENGGARA TIMUR	50	7	1	5	4	87	2		156
KALIMANTAN BARAT	55	7		1	1	71	1		136
KALIMANTAN TENGAH	8	10			2	50	1	1	72
KALIMANTAN SELATAN	26	10		1	5	169	1		212
KALIMANTAN TIMUR	22	5	1		1	116	1	1	147
KALIMANTAN UTARA	12	2				11			25
SULAWESI UTARA	24	3			3	48	1		79
SULAWESI TENGAH	21	10			1	91		2	125
SULAWESI SELATAN	109	19	3		9	372	1		513
SULAWESI TENGGARA	15	7	2		1	68	2		95
GORONTALO	4	5				43	1		53
SULAWESI BARAT	33	2				31			66
MALUKU	5	4	2		1	15			27
MALUKU UTARA	13	2	1		1	29	1		47
PAPUA BARAT	15	2	1		1	9			28
PAPUA	20	8			4	37	1		70
<b>Total</b>	<b>3,894</b>	<b>328</b>	<b>31</b>	<b>271</b>	<b>226</b>	<b>8,082</b>	<b>30</b>	<b>103</b>	<b>12,965</b>

Sumber: Kemnaker RI, Ditjen. Binalavotas (data per Semester II Tahun 2023) – diolah Pusdatik Kemnaker

Keterangan:

\*\*\* Angka bersifat sementara

Tabel 2.4.  
Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja menurut Provinsi dan Status Akreditasi  
s.d Semester II Tahun 2023\*\*\*

PROVINSI	Status Akreditasi		TOTAL
	Terakreditasi	Belum Terakreditasi	
(1)	(2)	(3)	(4)
ACEH	21	250	271
SUMATERA UTARA	51	661	712
SUMATERA BARAT	60	242	302
RIAU	10	176	186
JAMBI	15	212	227
SUMATERA SELATAN	38	233	271
BENGKULU	7	102	109
LAMPUNG	55	325	380
KEP. BANGKA BELITUNG	5	42	47
KEP. RIAU	25	82	107
DKI JAKARTA	51	463	514
JAWA BARAT	298	2,274	2,572
JAWA TENGAH	209	1,697	1,906
DI YOGYAKARTA	47	234	281
JAWA TIMUR	163	1,805	1,968
BANTEN	64	486	550
BALI	87	251	338
NUSA TENGGARA BARAT	86	287	373
NUSA TENGGARA TIMUR	21	135	156
KALIMANTAN BARAT	14	122	136
KALIMANTAN TENGAH	14	58	72
KALIMANTAN SELATAN	21	191	212
KALIMANTAN TIMUR	27	120	147
KALIMANTAN UTARA	1	24	25
SULAWESI UTARA	8	71	79
SULAWESI TENGAH	12	113	125
SULAWESI SELATAN	76	437	513
SULAWESI TENGGARA	24	71	95
GORONTALO	3	50	53
SULAWESI BARAT	2	64	66
MALUKU	13	14	27
MALUKU UTARA	5	42	47
PAPUA BARAT	1	27	28
PAPUA	7	63	70
<b>Total</b>	<b>1,541</b>	<b>11,424</b>	<b>12,965</b>

Sumber: Kemnaker RI, Ditjen. Binalavotas (data per Semester II Tahun 2023) – diolah Pusdatik Kemnaker  
Keterangan:

\*\*\* Angka bersifat sementara

#### 4. Data Talent Corner di BLK UPTP

Tabel 2.5  
Daftar UPT BPVP yang memiliki Talent Corner Tahun 2023

No.	Nama Lembaga	Alamat Lengkap
1	BBPVP BANDUNG	Jl. Jenderal gatot subroto no. 170 Kelurahan Gumuruh, Kecamatan Batununggal, Kota Kota Bandung, Jawa Barat 40275
2	BBPVP BEKASI	Jalan Guntur Raya No.1, Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan Kota Kota Bekasi, Jawa Barat 17144
3	BBPVP MAKASSAR	Jalan Taman Makam Pahlawan No.4 Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar Sulawesi Selatan 90231
4	BBPVP MEDAN	Jl. Gatot subroto km 7,8 medan, sumatera utara, Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Kota Medan, Sumatera Utara 20127
5	BBPVP SEMARANG	Jl. Brigjen sudiarto no.118, palebon, Kelurahan Plamongan Sari, Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, Jawa Tengah 50199
6	BBPVP SERANG	Jl. Raya pandeglang km. 3, Kelurahan Karundang, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Kota Serang, Banten 42125
7	BPVP AMBON	JL. KAREL SATSUITUBUN NO. 46 PASSO AMBON, Kelurahan Halong, Kecamatan Baguala Kota, Kota Ambon, Maluku 97231
8	BPVP BANDA ACEH	JL. KESATRIA GEUCEU KOMPLEK KOTA BANDA ACEH, Kelurahan Geuceu Komplek, Kecamatan Banda Raya Kota, Kota Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) 23239
9	BPVP BANDUNG BARAT	Jl. Raya tangkuban parahu, cikole, Kelurahan Cibogo, Kecamatan Lembang Kota Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40391
10	BPVP BANTAENG	JALAN POROS BANTAENG-BULUKUMBA DESA BARUGA KECAMATAN PAJUKUKANG KABUPATEN BANTAENG, Kelurahan Baruga, Kecamatan Pajukukang, Kota Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan 92461
11	BPVP BANYUWANGI	Jl. Ahmad Yani, Krajan, Kedungrejo, Kecamatan Muncar Kota Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 68472
12	BPVP BELITUNG	JALAN NELOK, DESA KECIPUT, KECAMATAN SIJUK, KABUPATEN BELITUNG, Kelurahan Keciput, Kecamatan Sijuk Kota Kabupaten Belitung, Bangka Belitung 33414

No.	Nama Lembaga	Alamat Lengkap
13	BPVP KENDARI	Jl. D.I. Panjaitan no.226, Kelurahan Anggilowu, Kecamatan Mandonga, Kota Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 93111
14	BPVP LOMBOK TIMUR	JALAN RAMBAN BIAK, DESA LENEK DAYA, KEC. LENEK, KAB. LOMBOK TIMUR, PROV. NUSA TENGGARA BARAT, Kelurahan Lenek Pesiraman, Kecamatan Aikmel, Kota Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) 83653
15	BPVP PADANG	Jl. Sungai balang, bandar buat, lubuk kilangan, kota padang, provinsi sumatera barat, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Kota Padang, Sumatera Barat 25157
16	BPVP PANGKEP	JLN.BLK NO.02 POROS MAKASSAR-PARE PARE KM.83 MANDALLE, KAB.PANGKEP, Kelurahan Mandalle, Kecamatan Mandalle Kota Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan 90655
17	BPVP SAMARINDA	Jl. Untung Suropati No.43, Karang Asam Ulu, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75126
18	BPVP SIDOARJO	JL. RAYA KEBARON NO. 1, KELURAHAN KEBARON, SIDOARJO, JAWA TIMUR, Kelurahan Kebaron, Kecamatan Tulangan Kota Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61273
19	BPVP SORONG	Jl. Basuki rahmat km. 9,5 sorong -Kelurahan Sawagumu, Kecamatan Malaimsimsa, Kota Kota Sorong, Papua Barat 98419
20	BPVP SURAKARTA	Jl. Bhayangkara No.38, Panularan, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57149
21	BPVP TERNATE	JL. MELATI KEL. BASTIONG, KOTA TERNATE, MALUKU UTARA Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan (Kota), Kota Kota Ternate, Maluku Utara 97716

Sumber: Kemnaker RI, Ditjen. Binalavotas (data per Semester II Tahun 2023) – diolah Pusdatik Kemnaker



## 5. Data Peserta Pemagangan Dalam Negeri

Tabel 2.6.  
Jumlah Peserta Pemagangan Dalam Negeri Menurut Provinsi dan Sumber Anggaran  
Tahun 2023

PROVINSI	SUMBER ANGGARAN				
	DEKONSENTRASI	DESTINASI PARIWISATA SUPER PRIORITAS (DPSP)	MANDIRI	APBD	APBN (DIT. BINA LAVOGAN)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ACEH	194	-	16		
SUMATERA UTARA	278	90	91		
SUMATERA BARAT	182	-	82	20	
RIAU	176	-	5		
JAMBI	164	-	3		
SUMATERA SELATAN	176	-	524		
BENGKULU	143	-	4		
LAMPUNG	173	-	19		
KEP. BANGKA BELITUNG	159	-	4		
KEP. RIAU	162	-	316		59
DKI JAKARTA	152	-	11,688		
JAWA BARAT	222	-	10,321		
JAWA TENGAH	299	80	3,824	90	
DI YOGYAKARTA	213	75	898		110
JAWA TIMUR	268	-	1,566		71
BANTEN	223	-	2,845		
BALI	194	-	779		
NUSA TENGGARA BARAT	238	100	13		
NUSA TENGGARA TIMUR	254	75	79		
KALIMANTAN BARAT	157	-	10		
KALIMANTAN TENGAH	157	-	626	50	
KALIMANTAN SELATAN	168	-	300		
KALIMANTAN TIMUR	216	-	226		
KALIMANTAN UTARA	144	-	-		
SULAWESI UTARA	252	80	38		
SULAWESI TENGAH	161	-	6		
SULAWESI SELATAN	177	-	148		
SULAWESI TENGGARA	174	-	4		
GORONTALO	114	-	-	130	
SULAWESI BARAT	142	-	-		
MALUKU	165	-	3		
MALUKU UTARA	164	-	-		
PAPUA BARAT	198	-	-		
PAPUA	241	-	4		
<b>Total</b>	<b>6,500</b>	<b>500</b>	<b>34,442</b>	<b>290</b>	<b>240</b>
<b>Grand Total</b>	<b>41,972</b>				

Sumber: Kemnaker RI, Ditjen. Binalavotas (data per Triwulan IV Tahun 2023) – diolah Pusdatik Kemnaker

## 6. Data Penyelenggara Pemagangan Dalam Negeri

Tabel 2.7.  
Jumlah Penyelenggara Pemagangan Dalam Negeri Menurut Provinsi  
s.d Triwulan IV Tahun 2023

PROVINSI	Jumlah Penyelenggara
(1)	(2)
ACEH	223
SUMATERA UTARA	117
SUMATERA BARAT	194
RIAU	121
JAMBI	105
SUMATERA SELATAN	80
BENGKULU	168
LAMPUNG	150
KEP. BANGKA BELITUNG	77
KEP. RIAU	17
DKI JAKARTA	102
JAWA BARAT	271
JAWA TENGAH	102
DI YOGYAKARTA	157
JAWA TIMUR	113
BANTEN	71
BALI	294
NUSA TENGGARA BARAT	243
NUSA TENGGARA TIMUR	149
KALIMANTAN BARAT	157
KALIMANTAN TENGAH	184
KALIMANTAN SELATAN	123
KALIMANTAN TIMUR	365
KALIMANTAN UTARA	70
SULAWESI UTARA	52
SULAWESI TENGAH	189
SULAWESI SELATAN	124
SULAWESI TENGGARA	117
GORONTALO	61
SULAWESI BARAT	82
MALUKU	103
MALUKU UTARA	46
PAPUA BARAT	75
PAPUA	101
<b>Total</b>	<b>4,603</b>

Sumber: Kemnaker RI, Ditjen. Binalavotas (data per Triwulan IV Tahun 2023) – diolah Pusdatik Kemnaker

## 7. Data Peserta Pemagangan Luar Negeri

Tabel 2.8.  
Jumlah Peserta Pemagangan Luar Negeri Menurut Tipe Penyelenggara  
Tahun 2023

BULAN	TIPE PENYELENGGARA		JUMLAH
	IM	SO	
(1)	(2)	(3)	(4)
Januari	165	232	397
Februari	197	74	271
Maret	246	-	246
April	178	238	416
Mei	236	116	352
Juni	-	551	551
Juli	329	580	909
Agustus	203	1,647	1,850
September	187	1,768	1,955
Oktober	157	2,091	2,248
November	130	2,151	2,281
Desember	116	1,804	1,920
<b>Total</b>	<b>2,144</b>	<b>11,252</b>	<b>13,396</b>

Sumber: Kemnaker RI, Ditjen. Binalavotas (data per Triwulan IV Tahun 2023) – diolah Pusdatik Kemnaker

**Keterangan:**

IM adalah singkatan dari International Manpower

SO adalah singkatan dari Sending Organization

Tabel 2.9.  
Jumlah Peserta Pemagangan Luar Negeri Menurut Tipe Penyelenggara dan Jenis Kelamin  
Tahun 2023

TIPE PENYELENGGARA	JENIS KELAMIN		Tidak Teridentifikasi	JUMLAH
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
IM JAPAN	2,051	93	-	2,144
LPK/SO	8,478	2,765	9	11,252
<b>Total</b>	<b>10,529</b>	<b>2,858</b>	<b>9</b>	<b>13,396</b>

Sumber: Kemnaker RI, Ditjen. Binalavotas (data per Triwulan IV Tahun 2023) – diolah Pusdatik Kemnaker

**Keterangan:**

IM adalah singkatan dari International Manpower

SO adalah singkatan dari Sending Organization

## 8. Data Penyelenggara Pemagangan Luar Negeri

Tabel 2.10.  
Jumlah *Sending Organization* Penyelenggara Pemagangan Luar Negeri Menurut Provinsi  
s.d. Triwulan IV Tahun 2023\*\*\*

PROVINSI	Jumlah Penyelenggara
(1)	(2)
SUMATERA UTARA	6
SUMATERA BARAT	8
KEPULAUAN RIAU	1
LAMPUNG	8
DKI JAKARTA	22
BANTEN	20
JAWA BARAT	151
JAWA TENGAH	54
D.I. YOGYAKARTA	13
JAWA TIMUR	34
BALI	38
NUSA TENGGARA BARAT	10
KALIMANTAN BARAT	1
GORONTALO	1
SULAWESI UTARA	8
SULAWESI TENGGARA	2
SULAWESI SELATAN	5
<b>Total</b>	<b>382</b>

Sumber: Kemnaker RI, Ditjen. Binalavotas (data per Triwulan IV Tahun 2023) – diolah Pusdatik Kemnaker  
Keterangan:

\*\*\* Angka bersifat sementara

## 9. Data Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK)

Tabel 2.11.  
Jumlah Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) menurut Provinsi dan Tipe Lembaga  
Tahun 2023\*\*\*

PROVINSI	TIPE LEMBAGA						Tidak Teridentifikasi	JUMLAH
	BLK KOMUNITAS	BLK UPTD	UPT BPVP	BLKLN	LPK SWASTA	SKPD		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
ACEH	846	2,130	1,238		64			4,278
SUMATERA UTARA	208	1,183	2,613	-	147	-	-	4,151
SUMATERA BARAT	843	2,414	1,710	-	337	-	-	5,304
RIAU	191	383	175	-	-	-	-	749
JAMBI	994	1,135			17			2,146
SUMATERA SELATAN	864	1,840	-	-	48	-	-	2,752
BENGKULU	32	1,244	-	-	68	-	-	1,344
LAMPUNG	1,248	976	-	-	128	-	-	2,352
KEP. BANGKA BELITUNG	96	64	1,120		32			1,312
KEPULAUAN RIAU		358			32			390

DKI JAKARTA	138	-	-	16	206	-	-	360
JAWA BARAT	5,208	4,360	10,912	480	1,720	-	16	22,696
JAWA TENGAH	6,287	7,631	7,610	816	977	-	-	23,321
DI YOGYAKARTA	336	1,056	-	-	128	-	-	1,520
JAWA TIMUR	8,301	5,759	4,314	255	1,402	144	-	20,175
BANTEN	1,632	384	3,440	-	288	-	11	5,755
BALI	240	1,744	-	-	80	-	-	2,064
NUSA TENGGARA BARAT (NTB)	1,246	2,048	2,736	-	256	-	-	6,286
NUSA TENGGARA TIMUR (NTT)	656	466	254	-	64	-	-	1,440
KALIMANTAN BARAT	576	832	-	-	-	-	-	1,408
KALIMANTAN TENGAH		1,183			10			1,193
KALIMANTAN SELATAN	90	1,760	-	-	-	-	-	1,850
KALIMANTAN TIMUR	80	976	2,420	-	80	-	-	3,556
KALIMANTAN UTARA	16	432	-	-	16	-	-	464
SULAWESI UTARA	256	271	48	-	32	-	-	607
SULAWESI TENGAH	50	1,251	-	-	56	-	20	1,377
SULAWESI SELATAN	707	2,275	6,262	-	192	-	-	9,436
SULAWESI TENGGARA	208	1,056	1,296		32			2,592
GORONTALO		726						726
SULAWESI BARAT	205	384						589
MALUKU	96	528	1,437					2,061
MALUKU UTARA	62	9	1,634	-	-	-	3	1,708
PAPUA BARAT	16	208	1,503	-	-	-	-	1,727
PAPUA	48	527	-	-	-	-	-	575
PAPUA TENGAH	48	-	130	-	-	-	-	178
PAPUA SELATAN	15		48					63
PAPUA BARAT DAYA	15		561					576
Tidak Teridentifikasi			16		1		96	113
<b>Grand Total</b>	<b>31,854</b>	<b>47,593</b>	<b>51,477</b>	<b>1,567</b>	<b>6,413</b>	<b>144</b>	<b>146</b>	<b>139,194</b>

Sumber: Kemnaker RI, Ditjen. Binalavotas (data per Semester II Tahun 2023) – diolah Pusdatik Kemnaker

Keterangan:

\*\*\* Angka bersifat sementara

Tabel 2.12.  
Jumlah Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) menurut Provinsi dan Jenis Kelamin Tahun 2023\*\*\*

PROVINSI (1)	JENIS KELAMIN		JUMLAH (4)
	LAKI-LAKI (2)	PEREMPUAN (3)	
ACEH	2,083	2,195	4,278
SUMATERA UTARA	1,768	2,383	4,151
SUMATERA BARAT	2,761	2,543	5,304
RIAU	377	372	749
JAMBI	960	1,186	2,146
SUMATERA SELATAN	1,342	1,410	2,752
BENGKULU	609	735	1,344
LAMPUNG	1,022	1,330	2,352
KEP. BANGKA BELITUNG	762	550	1,312
KEPULAUAN RIAU	244	146	390
DKI JAKARTA	107	253	360
JAWA BARAT	12,090	10,606	22,696

JAWA TENGAH	10,202	13,119	23,321
DI YOGYAKARTA	816	704	1,520
JAWA TIMUR	8,756	11,419	20,175
BANTEN	3,538	2,217	5,755
BALI	858	1,206	2,064
NUSA TENGGARA BARAT (NTB)	3,135	3,151	6,286
NUSA TENGGARA TIMUR (NTT)	581	859	1,440
KALIMANTAN BARAT	673	735	1,408
KALIMANTAN TENGAH	491	702	1,193
KALIMANTAN SELATAN	859	991	1,850
KALIMANTAN TIMUR	2,025	1,531	3,556
KALIMANTAN UTARA	302	162	464
SULAWESI UTARA	225	382	607
SULAWESI TENGAH	683	694	1,377
SULAWESI SELATAN	3,645	5,791	9,436
SULAWESI TENGGARA	1,150	1,442	2,592
GORONTALO	328	398	726
SULAWESI BARAT	259	330	589
MALUKU	1,151	910	2,061
MALUKU UTARA	962	746	1,708
PAPUA BARAT	862	865	1,727
PAPUA	352	223	575
PAPUA TENGAH	128	50	178
PAPUA SELATAN	20	43	63
PAPUA BARAT DAYA	307	269	576
<b>Tidak Teridentifikasi</b>	<b>1</b>	<b>112</b>	<b>113</b>
<b>Total</b>	<b>66,434</b>	<b>72,760</b>	<b>139,194</b>

Sumber: Kemnaker RI, Ditjen. Binalavotas (data per Triwulan II Tahun 2023) – diolah Pusdatik Kemnaker

Keterangan:

\* Angka bersifat sementara

Tabel 2.13  
Jumlah Tenaga Kerja Yang Meningkatkan Produktivitasnya Tahun 2023

A. Data Pengukuran Tenaga Kerja		
No.	Intervensi	Jumlah Tenaga Kerja
1	Pelatihan PBK	122.446
2	Pelatihan Peningkatan Produktivitas UPTP	5.650
3	Pelatihan Peningkatan Produktivitas Dinas Provinsi	1.000
4	Pengukuran Produktivitas UPTP	167.154
5	Pengukuran Produktivitas Sektor Publik	815.330
6	Perusahaan Calon Penerima Paramakarya	50.937
7	TKM Lanjutan 2022	410
8	IKN	960
9	BPJS Ketenagakerjaan	500.025
<b>Jumlah</b>		<b>1.662.912</b>

Sumber: Kemnaker RI, Ditjen. Binalavotas (data per Semester II Tahun 2023) – diolah Pusdatik Kemnaker

Tabel 2.15  
Jumlah Instruktur menurut Provinsi dan Kategori Instruktur Tahun 2023

Provinsi	Instruktur Pemerintah	Instruktur Swasta	Jumlah
Aceh	88	182	270
Bali	61	231	292
Banten	107	290	397
Bengkulu	55	77	132
D.I. Yogyakarta	99	123	222
D.K.I. Jakarta	202	361	563
Gorontalo	26	16	42
Jambi	37	100	137
Jawa Barat	434	1.532	1.966
Jawa Tengah	581	729	1.310
Jawa Timur	312	1.026	1.338
Kalimantan Barat	38	59	97
Kalimantan Selatan	79	144	223
Kalimantan Tengah	32	62	94
Kalimantan Timur	59	117	176
Kalimantan Utara	17	12	29
Kepulauan Bangka Belitung	37	49	86
Kepulauan Riau	11	35	46
Lampung	52	206	258
Maluku	53	29	82
Maluku Utara	45	10	55
Nusa Tenggara Barat	79	246	325
Nusa Tenggara Timur	23	50	73
Papua	40	38	78
Papua Barat	40	11	51
Riau	17	261	278
Sulawesi Barat	12	9	21
Sulawesi Selatan	220	198	418
Sulawesi Tengah	33	54	87
Sulawesi Tenggara	65	78	143
Sulawesi Utara	9	51	60
Sumatera Barat	130	164	294
Sumatera Selatan	70	221	291
Sumatera Utara	95	352	447
Undefined	0	6	6
<b>Total</b>	<b>3.258</b>	<b>7.129</b>	<b>10.387</b>

Sumber: Kemnaker RI, Ditjen. Binalavotas (data per Semester II Tahun 2023) – diolah Pusdatik Kemnaker

Tabel 2.16  
Jumlah Tenaga Pelatihan menurut Provinsi dan Kategori Tenaga Pelatihan  
Tahun 2023

Provinsi	Tenaga Pelatihan Pemerintah	Tenaga Pelatihan Swasta	Jumlah
Aceh	45	95	140
Bali	34	44	78
Banten	85	64	149
Bengkulu	40	40	80
D.I. Yogyakarta	32	41	73
D.K.I. Jakarta	136	111	247
Gorontalo	13	7	20
Jambi	21	54	75
Jawa Barat	142	544	686
Jawa Tengah	220	298	518
Jawa Timur	239	347	586
Kalimantan Barat	13	25	38
Kalimantan Selatan	34	64	98
Kalimantan Tengah	24	16	40
Kalimantan Timur	44	90	134
Kalimantan Utara	7	7	14
Kepulauan Bangka Belitung	16	30	46
Kepulauan Riau	8	6	14
Lampung	61	80	141
Maluku	14	12	26
Maluku Utara	14	16	30
Nusa Tenggara Barat	46	112	158
Nusa Tenggara Timur	16	19	35
Papua	13	8	21
Papua Barat	18	12	30
Riau	18	76	94
Sulawesi Barat	4	13	17
Sulawesi Selatan	80	182	262
Sulawesi Tengah	21	15	36
Sulawesi Tenggara	67	15	82
Sulawesi Utara	1	7	8
Sumatera Barat	72	82	154
Sumatera Selatan	35	50	85
Sumatera Utara	53	123	176
Undefined	-	15	15
<b>Total</b>	<b>1.686</b>	<b>2.720</b>	<b>4.406</b>

Sumber: Kemnaker RI, Ditjen. Binalavotas (data per Semester II Tahun 2023) – diolah Pusatdik Kemnaker



Tabel 2.17  
Jumlah Tenaga Kerja Tersertifikasi pada tahun 2023

Provinsi	Total
Aceh	10.480
Bali	47.893
Banten	43.608
Bengkulu	4.761
Daerah Istimewa Yogyakarta	24.815
DKI Jakarta	108.686
Gorontalo	2.145
Jambi	7.279
Jawa Barat	224.643
Jawa Tengah	220.306
Jawa Timur	205.156
Kalimantan Barat	11.031
Kalimantan Selatan	17.296
Kalimantan Tengah	7.896
Kalimantan Timur	44.443
Kalimantan Utara	2.074
Kepulauan Bangka Belitung	3.304
Kepulauan Riau	13.727
Lampung	26.134
Luar Negeri	36
Maluku	4.786
Maluku Utara	2.506
Nusa Tenggara Barat	23.811
Nusa Tenggara Timur	12.785
Papua	3.765
Papua Barat	3.986
Papua Selatan	1
Papua Tengah	1
Riau	25.880
Sulawesi Barat	2.632
Sulawesi Selatan	22.892
Sulawesi Tengah	4.093
Sulawesi Tenggara	6.684
Sulawesi Utara	4.909
Sumatera Barat	21.311
Sumatera Selatan	27.090
Sumatera Utara	38.233
<b>Total</b>	<b>1.231.078</b>

Sumber: Kemnaker RI, Ditjen. Binalavotas (data per Semester II Tahun 2023)

– diolah Pusdatik Kemnaker

Tabel 2.18  
Jumlah LSP Terlisensi menurut Provinsi dan Jenis LSP Tahun 2023

Provinsi	LSP P1	LSP P2	LSP P3	Total
Aceh	1	33		34
Bali		44	15	59
Banten	4	40	24	68
Bengkulu		4		4
Daerah Istimewa Yogyakarta	3	63	16	82
DKI Jakarta	44	163	206	413
Gorontalo		5		5
Jambi		8		8
Jawa Barat	22	262	95	379
Jawa Tengah	8	311	17	336
Jawa Timur	14	313	53	380
Kalimantan Barat		11	1	12
Kalimantan Selatan		24		24
Kalimantan Tengah		9	2	11
Kalimantan Timur	4	33	2	39
Kalimantan Utara		3		3
Kepulauan Bangka Belitung	1	7		8
Kepulauan Riau		19	4	23
Lampung		36	2	38
Maluku	1	4		5
Maluku Utara	1	1	1	3
Nusa Tenggara Barat	2	15	3	20
Nusa Tenggara Timur		10	1	11
Papua		7		7
Papua Barat	1	5		6
Riau		34	2	36
Sulawesi Barat		14	1	15
Sulawesi Selatan	4	31	7	42
Sulawesi Tengah		6		6
Sulawesi Tenggara	1			1
Sulawesi Utara		7	1	8
Sumatera Barat	2	65	1	68
Sumatera Selatan		51	2	53
Sumatera Utara	1	33	4	38
<b>Total</b>	<b>114</b>	<b>1671</b>	<b>460</b>	<b>2.245</b>

Sumber: Kemnaker RI, Ditjen. Binalavotas (data per Semester II Tahun 2023) – diolah Pusdatik Kemnaker

**BAB III**

**DATA BIDANG PENEMPATAN  
DAN PERLUASAN KESEMPATAN  
KERJA**



### 3.1 Data Tenaga Kerja yang Ditempatkan oleh Bursa Kerja Khusus (BKK)

#### 3. 1. 1. Jumlah Penempatan Tenaga Kerja yang Terdaftar melalui Bursa Kerja Khusus Berdasarkan Provinsi Asal dan Jenis Kelamin Tahun 2023

Provinsi Asal	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Jawa Barat	118	8	126
Jawa Timur	2.016	1.128	3.144
<b>Jumlah</b>	<b>2.134</b>	<b>1.136</b>	<b>3.270</b>

Sumber: Ditjen Binapenta dan PKK, diolah Pusdatik Kemnaker  
Keterangan: Data sangat sementara

### 3.2 Data Tenaga Kerja yang Ditempatkan oleh Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)

#### 3. 2. 1. Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Melalui Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) Berdasarkan Provinsi Asal dan Jenis Kelamin Tahun 2023

Provinsi Asal	Jenis Kelamin		Grand Total
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	1	1	2
Banten	26	1	27
D.I.Yogyakarta	1	10	11
DKI Jakarta	12	6	18
Gorontalo	1		1
Jawa Barat	78	15	93
Jawa Tengah	78	37	115
Jawa Timur	10		10
Kalimantan Tengah	1		1
Kalimantan Timur	1		1
Kepulauan Riau	42	60	102
Lampung	3	1	4
Maluku	1		1
Maluku Utara	1		1
Nusa Tenggara Barat	30	44	74
Nusa Tenggara Timur	125	10	135
Papua Barat	1		1
Sulawesi Barat	8		8
Sulawesi Selatan	86	3	89
Sulawesi Tengah	82		82
Sulawesi Tenggara	31	2	33
Sulawesi Utara	4		4
Sumatera Barat	2		2
Sumatera Selatan	1		1
Sumatera Utara		3	3
Tidak Terdefinisi*	23	66	89
<b>Grand Total</b>	<b>649</b>	<b>259</b>	<b>908</b>

Sumber: Ditjen Binapenta dan PKK, diolah Pusdatik Kemnaker  
Keterangan: \*Informasi tidak terisi lengkap

### 3. 2. 2. Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Melalui Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) Berdasarkan Provinsi Asal dan Lulusan Pendidikan Tahun 2023

Provinsi	Lulusan Pendidikan							Grand Total
	SD/MI/ sederajat	SMP sederajat	SMA/SMK/ sederajat	Diploma I/II/III	Diploma IV/Sarjana	Magister	Lainnya*	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh		1	1					2
Banten		7	13		6	1		27
D.I.Yogyakarta			11					11
DKI Jakarta	1		10	1	5	1		18
Gorontalo			1					1
Jawa Barat	1	10	66	5	11			93
Jawa Tengah	1	1	110		3			115
Jawa Timur			7		3			10
Kalimantan Tengah			1					1
Kalimantan Timur			1					1
Kepulauan Riau	1	2	90	2	4		3	102
Lampung			3	1				4
Maluku			1					1
Maluku Utara		1						1
Nusa Tenggara Barat	2	2	25	1			44	74
Nusa Tenggara Timur	43	26	59				7	135
Papua Barat			1					1
Sulawesi Barat			8					8
Sulawesi Selatan		4	81	3	1			89
Sulawesi Tengah		2	79	1				82
Sulawesi Tenggara	1		32					33
Sulawesi Utara		1	3					4
Sumatera Barat			2					2
Sumatera Selatan				1				1
Sumatera Utara			3					3
Tidak Terdefinisi*			74	12	2		1	89
<b>Grand Total</b>	<b>50</b>	<b>57</b>	<b>682</b>	<b>27</b>	<b>35</b>	<b>2</b>	<b>55</b>	<b>908</b>

Sumber: Ditjen Binapenta dan PKK, diolah Pusdatik Kemnaker

Keterangan: \*Informasi tidak terisi lengkap

### 3.3 Data Tenaga Kerja Disabilitas yang Ditempatkan

#### 3. 3. 1. Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Berdasarkan Ragam Disabilitas dan Jenis Kelamin Tahun 2023

Ragam Disabilitas	Jenis Kelamin		Grand Total
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Disabilitas Fisik	216	135	351
Disabilitas Ganda	9	2	11
Disabilitas Mental	5	16	21
Disabilitas Sensorik	166	120	286
Tidak Terdefinisi*	22	11	33
<b>Grand Total</b>	<b>418</b>	<b>284</b>	<b>702</b>

Sumber: Ditjen Binapenta dan PKK, diolah Pusdatik Kemnaker

Keterangan: \*Informasi tidak terisi lengkap

### 3.4 Data Tenaga Kerja yang Ditempatkan oleh Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT)

#### 3.4.1. Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan oleh Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT) Berdasarkan Provinsi Penempatan dan Jenis Kelamin Tahun 2023

Provinsi	Jenis Kelamin		Grand Total
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh		1	1
Bali	1	32	33
Banten	9	741	750
Bengkulu		8	8
DI Yogyakarta		1	1
DKI Jakarta	38	2346	2384
Gorontalo		7	7
Jambi	3	205	208
Jawa Barat	6	411	417
Jawa Tengah	2	191	193
Jawa Timur		53	53
Kalimantan Barat	1	11	12
Kalimantan Selatan		19	19
Kalimantan Tengah		2	2
Kalimantan Timur		17	17
Kalimantan Utara		1	1
Kepulauan Bangka Belitung		4	4
Kepulauan Riau	49	1069	1118
Lampung		6	6
Maluku Utara		4	4
Nusa Tenggara Barat		1	1
Nusa Tenggara Timur		9	9
Papua		3	3
Papua Barat		3	3
Riau	3	102	105
Sulawesi Selatan	7	580	587
Sulawesi Tengah		9	9
Sulawesi Tenggara		4	4
Sulawesi Utara	1	129	130
Sumatera Barat	1	21	22
Sumatera Selatan		77	77
Sumatera Utara	9	673	682
Tidak Terdefinisi*		21	21
<b>Grand Total</b>	<b>130</b>	<b>6.761</b>	<b>6.891</b>

Sumber: Ditjen Binapenta dan PKK, diolah Pusdatik Kemnaker

Keterangan: \*Informasi tidak terisi lengkap

### 3.5 Data PMI yang Ditempatkan

#### 3.5.1. Jumlah Penempatan PMI Berdasarkan Skema Penempatan, Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin Tahun 2023

Skema Penempatan (1)	FORMAL		Total (4)	INFORMAL		Total (7)	Grand Total (8)
	L (2)	P (3)		L (5)	P (6)		
G TO G	11.185	783	11.968				11.968
P TO P	74.014	22.307	96.321	254	120.690	120.944	217.265
PMI PERPANJANGAN PK	1.777	863	2.640	291	969	1.260	3.900
PMI PERPANJANGAN PK LN	6.866	15.528	22.394				22.394
PMI PERSEORANGAN	12.303	6.719	19.022	1		1	19.023
UKPS	411	4	415				415
<b>Grand Total</b>	<b>106.556</b>	<b>46.204</b>	<b>152.760</b>	<b>546</b>	<b>121.659</b>	<b>122.205</b>	<b>274.965</b>

Sumber: Pusdatin BP2MI diolah Pusdatik Kemnaker, Data ditarik pada 1 Januari 2024

#### 3.5.2. Jumlah Penempatan PMI Berdasarkan Negara Penempatan, Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin Tahun 2023

Negara Penempatan (1)	FORMAL		Total (4)	INFORMAL		Total (7)	Grand Total (8)
	L (2)	P (3)		L (5)	P (6)		
ALBANIA	3	7	10				10
AMERIKA SERIKAT	3	1	4				4
ANGOLA	1		1				1
ANGUILLA	1	3	4				4
ARAB SAUDI	4.047	2.124	6.171	26	113	139	6.310
ARMENIA		5	5				5
AUSTRALIA	1		1				1
AUSTRIA	13	2	15				15
AZERBAIJAN		7	7				7
BAHAMA	77		77				77
BAHRAIN	30	24	54	1		1	55
BELANDA	1	4	5				5
BELARUS		11	11				11
BERMUDA		1	1				1
BOSNIA HERZEGOVINA	2	6	8				8
BRUNAI DARUSSALAM	2.281	371	2.652	42	178	220	2.872
BULGARIA	116	62	178				178
BURKINA FASO		1	1				1
CANADA	3	1	4				4
CINA	3	9	12				12
CURACAO	1		1				1
CZECH	12	1	13				13
DOMINICA	45		45				45
ERITREA	1		1				1
FIJI	3		3				3
FILIPINA	1		1				1
GABON	22	4	26				26
GUINEA	1	1	2				2
GUYANA	23	2	25				25
HAITI		1	1				1
HONG KONG	6	144	150	187	65.579	65.766	65.916
HUNGARIA	380	67	447				447
INDIA	15		15				15
INGGRIS	25	9	34				34
IRAK	2		2				2



Negara Penempatan (1)	FORMAL		Total (4)	INFORMAL		Total (7)	Grand Total (8)
	L (2)	P (3)		L (5)	P (6)		
IRLANDIA	1		1				1
ITALIA	3.124	395	3.519				3.519
JEPANG	6.744	2.928	9.672	1		1	9.673
JERMAN	36	60	96				96
KAMBOJA	41	7	48	1		1	49
KAZAKHSTAN		6	6				6
KEPULAUAN COOK	48	19	67				67
KEPULAUAN SOLOMON	367	8	375				375
KEPULAUAN VIRGIN INGGRIS	1	2	3				3
KERAJAAN INGGRIS RAYA DAN IRLANDIA UTARA		1	1				1
KONGO	9	3	12				12
KOREA SELATAN	12.118	462	12.580				12.580
KROASIA	21	8	29				29
KUWAIT	255	170	425				425
KYRGYZSTAN		2	2				2
LIBANON		5	5				5
LIBERIA	16	1	17				17
LITHUANIA		5	5				5
MAKAO	18	17	35				35
MALADEWA	120	209	329		1	1	330
MALAGASI		1	1				1
MALAYSIA	48.251	16.609	64.860	245	7.155	7.400	72.260
MALDIVEST	164	224	388				388
MALTA		1	1				1
MAROKO		6	6				6
MAURITIUS		3	3				3
MEKSIKO		17	17				17
MESIR	1	9	10				10
NIGERIA	1	8	9				9
OMAN	45	29	74	1	27	28	102
PAKISTAN		3	3				3
PALAU		1	1				1
PAPUA NUGINI	574	59	633	1		1	634
PERANCIS	41	9	50				50
POLANDIA	1.029	491	1.520	1	3	4	1.524
PULAU CAYMAN		1	1				1
QATAR	151	140	291		16	16	307
REPUBLIK MOLDOVA		3	3				3
RUMANIA	88	133	221				221
RUSIA	1	245	246				246
SAINT LUCIA	1		1				1
SAMOA AMERIKA	8	1	9				9
SELANDIA BARU	297	38	335				335
SERBIA	7	1	8				8
SEYCHELLES	22	5	27				27
SINGAPURA	4	119	123	1	7.774	7.775	7.898
SIPRUS	1	104	105				105
SLOVAKIA	370	31	401				401
SPANYOL	3		3				3
SRILANKA	34	105	139				139
SURINAME	37		37				37
SWAZILAND	1		1				1
TAIWAN	24.251	18.150	42.401	38	40.777	40.815	83.216
TAJKISTAN		3	3				3
THAILAND	12	2	14				14

Negara Penempatan (1)	FORMAL		Total (4)	INFORMAL		Total (7)	Grand Total (8)
	L (2)	P (3)		L (5)	P (6)		
TURKI	447	1.841	2.288		1	1	2.289
UNI EMIRAT ARAB	366	575	941	1	34	35	976
UZBEKISTAN		35	35				35
YORDANIA	20	25	45		1	1	46
YUNANI	2	1	3				3
ZAMBIA	289		289				289
<b>Grand Total</b>	<b>106.556</b>	<b>46.204</b>	<b>152.760</b>	<b>546</b>	<b>121.659</b>	<b>122.205</b>	<b>274.965</b>

Sumber: Pusdatin BP2MI diolah Pusdatik Kemnaker, Data ditarik pada 1 Januari 2024

### 3. 5. 3. Jumlah Penempatan PMI Berdasarkan Provinsi Asal, Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin Tahun 2023

Provinsi Asal (1)	FORMAL		Total (4)	INFORMAL		Total (7)	Grand Total (8)
	L (2)	P (3)		L (5)	P (6)		
ACEH	626	286	912	3	44	47	959
BALI	5.013	4.305	9.318	1	40	41	9.359
BANGKA BELITUNG	14	8	22		13	13	35
BANTEN	1.087	635	1.722	5	1.456	1.461	3.183
BENGKULU	231	123	354		193	193	547
DI YOGYAKARTA	630	434	1.064	1	263	264	1.328
DKI JAKARTA	491	389	880	7	609	616	1.496
GORONTALO	5	11	16		4	4	20
J A M B I	169	77	246	1	69	70	316
JAWA BARAT	12.418	8.188	20.606	38	32.317	32.355	52.961
JAWA TENGAH	21.026	9.280	30.306	61	28.642	28.703	59.009
JAWA TIMUR	21.422	8.139	29.561	169	38.339	38.508	68.069
KALIMANTAN BARAT	591	226	817	3	55	58	875
KALIMANTAN SELATAN	37	77	114		58	58	172
KALIMANTAN TENGAH	24	23	47		23	23	70
KALIMANTAN TIMUR	82	19	101	1	35	36	137
KALIMANTAN UTARA	289	64	353	5	21	26	379
KEPULAUAN RIAU	742	124	866		38	38	904
LAMPUNG	6.407	2.926	9.333	10	12.196	12.206	21.539
MALUKU	14	19	33		15	15	48
MALUKU UTARA	2	10	12				12
NUSA TENGGARA BARAT	28.910	978	29.888	15	4.046	4.061	33.949
NUSA TENGGARA TIMUR	291	155	446	51	1.395	1.446	1.892
PAPUA	34	9	43		4	4	47
PAPUA BARAT	8	3	11		4	4	15
RIAU	231	285	516	1	30	31	547
SULAWESI BARAT	126	45	171	16	34	50	221
SULAWESI SELATAN	1.042	691	1.733	142	201	343	2.076
SULAWESI TENGAH	55	107	162	1	106	107	269
SULAWESI TENGGARA	140	48	188	12	85	97	285
SULAWESI UTARA	134	61	195	1	337	338	533
SUMATERA BARAT	625	440	1.065		10	10	1.075
SUMATERA SELATAN	663	639	1.302	1	785	786	2.088
SUMATERA UTARA	2.977	7.380	10.357	1	192	193	10.550
<b>Grand Total</b>	<b>106.556</b>	<b>46.204</b>	<b>152.760</b>	<b>546</b>	<b>121.659</b>	<b>122.205</b>	<b>274.965</b>

Sumber: Pusdatin BP2MI diolah Pusdatik Kemnaker, Data ditarik pada 1 Januari 2024

### 3.6 Data Perusahaan Penempatan PMI

#### 3. 6. 1. Jumlah Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) Berdasarkan Provinsi di Indonesia Tahun 2023

No	Provinsi	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	Bali	13
2	Banten	15
3	D.I.Yogyakarta	3
4	DKI Jakarta	122
5	Jawa Barat	108
6	Jawa Tengah	30
7	Jawa Timur	72
8	Kalimantan Barat	1
9	Kalimantan Utara	1
10	Kepulauan Riau	5
11	Lampung	5
12	Nusa Tenggara Barat	13
13	Nusa Tenggara Timur	1
14	Sumatera Barat	2
15	Sumatera Selatan	1
16	Sumatera Utara	8
<b>Grand Total</b>		<b>400</b>

Sumber: Ditjen Binapenta dan PKK, diolah Pusdatik Kemnaker

### 3.7 Data Lowongan Kerja di Luar Negeri

#### 3. 7. 1. Jumlah Job Order Berdasarkan Negara dan Jenis Kelamin Tahun 2023

Negara	Jenis Kelamin			Jumlah
	Laki - laki	Perempuan	Laki - laki/Perempuan*	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Arab Saudi	655	2.320	-	<b>2.975</b>
Brunei Darussalam	170	15	209	<b>394</b>
Hong Kong	3.332	93.223	100	<b>96.455</b>
Jepang	-	-	110	<b>110</b>
Korea Selatan	1.910	-	2.309	<b>4.219</b>
Kuwait	95	100	757	<b>952</b>
Makao	-	-	100	<b>100</b>
Malaysia	65.568	100.211	-	<b>165.779</b>
Polandia	240	60	1.810	<b>2.110</b>
Qatar	-	-	600	<b>600</b>
Selandia Baru	281	67	24	<b>372</b>
Singapura	63	52.759	3.360	<b>56.182</b>
Slovakia	50	-	755	<b>805</b>

Negara	Jenis Kelamin			Jumlah
	Laki - laki	Perempuan	Laki - laki/Perempuan*	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Taiwan	336.970	825.983	14	<b>1.162.967</b>
Turki	-	50	4.860	<b>4.910</b>
Uni Emirat Arab	115	1.050	99	<b>1.264</b>
Yordania	-	-	7	<b>7</b>
<b>Grand Total</b>	<b>409.449</b>	<b>1.075.838</b>	<b>15.114</b>	<b>1.500.201</b>

Sumber: Pusdatin BP2MI diolah Pusdatik Kemnaker, Data ditarik pada 1 Januari 2024

### 3.8 Data PMI yang Mendapat Layanan Perlindungan di Negara Penempatan

#### 3.8.1. Jumlah PMI yang Mendapat Layanan Perlindungan di Negara Penempatan Tahun 2023

No	Negara Penempatan	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	Arab Saudi	2.733
2	Singapura	10.270
3	Yordania	90
4	Uni Emirat Arab	2.470
5	Qatar	198
6	Taiwan	285
7	Malaysia	58
8	Kuwait	374
<b>Total</b>		<b>16.478</b>

Sumber: Ditjen Binapenta dan PKK, diolah Pusdatik Kemnaker

### 3.9 Data Permasalahan PMI di Luar Negeri

#### 3.9.1. Jumlah Pengaduan Permasalahan Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Negara Penempatan dan Jenis Kelamin Tahun 2023

Negara	Jenis Kelamin		Grand Total
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
ALBANIA	2		<b>2</b>
AUSTRALIA	15	2	<b>17</b>
BAHRAIN	1	10	<b>11</b>
BRAZIL	1		<b>1</b>
BRUNEI DARUSSALAM	18	8	<b>26</b>
BULGARIA	8	1	<b>9</b>
CAMBODIA	30	9	<b>39</b>
CANADA	4		<b>4</b>
CHINA	6	2	<b>8</b>
FIJI ISLANDS	4		<b>4</b>
FRANCE	1		<b>1</b>
GABON	1		<b>1</b>
GERMANY		1	<b>1</b>
GUYANA	1		<b>1</b>

Negara	Jenis Kelamin		Grand Total
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
HONG KONG	5	212	217
IRAQ	2	24	26
ITALY	1		1
JAPAN	8	2	10
KOREA SELATAN	69	7	76
KUWAIT	2		2
Lainnya	1	4	5
LAOS	5	2	7
LIBERIA	1		1
LIBYA		3	3
MALAYSIA	124	256	380
MESIR		3	3
MOZAMBIQUE	1		1
MYANMAR	44	8	52
NEW ZEALAND	1		1
OMAN		3	3
PAPUA NEW GUINEA	2		2
PERU	3		3
PHILIPPINES	6	1	7
POLAND	36	3	39
PORTUGAL	2		2
QATAR		5	5
ROMANIA	1		1
SAUDI ARABIA	40	458	498
SENEGAL	1		1
SERBIA AND MONTENEGRO	3		3
SINGAPORE	8	33	41
SLOVAKIA	6		6
SOLOMON ISLANDS	2		2
SOMALIA	1		1
SOUTH AFRICA	1		1
SURINAME	7		7
SYRIA		10	10
TAIWAN	293	74	367
THAILAND	2	1	3
TRINIDAD AND TOBAGO	1		1
TURKEY		6	6
UNITED ARAB EMIRATES	5	38	43
UNITED KINGDOM	28	5	33
UNITED STATES	2		2
YORDANIA		2	2
<b>Grand Total</b>	<b>806</b>	<b>1193</b>	<b>1999</b>

Sumber: Pusdatin BP2MI diolah Pusdatik Kemnaker, Data ditarik pada 1 Januari 2024

### 3.10 Data MoU Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Luar Negeri

#### 3. 10. 1. Jumlah MoU Indonesia Berdasarkan Negara dan Status Perjanjian Tahun 2023\*

No	Negara	Status Perjanjian			Jumlah	
		Berlaku	Proses Perundingan Pembaruan	Proses Perundingan Penyusunan		Tidak Berlaku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Arab Saudi	0	0	0	0	0
2	Malaysia	0	0	0	0	0
3	Jepang	0	0	0	0	0
4	Korea	0	0	0	0	0
5	Brunei Darussalam	0	0	0	0	0
6	Taiwan	0	0	0	0	0
7	Australia	0	0	0	0	0
8	Jerman	0	0	0	0	0
9	Kuwait	0	0	0	0	0
10	United Emirates Arab	0	0	0	0	0
11	Swiss	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sumber: Ditjen Binapenta dan PKK, diolah Pusdatik Kemnaker

Keterangan: \*tidak ada MoU Penempatan dan Pelindungan PMI pada Tahun 2023

### 3.11 Data Tenaga Kerja Peserta Program Padat Karya

#### 3. 11. 1. Jumlah Paket Program Padat Karya yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Berdasarkan Provinsi Tahun 2023

No	Provinsi	Jenis Kelamin		Jumlah
		Perempuan	Laki-Laki	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	101	219	320
2	Bali	86	394	480
3	Banten	155	1.045	1.200
4	Bengkulu	25	215	240
5	DI Yogyakarta	37	443	480
6	DKI Jakarta	351	1.769	2.120
7	Jambi	122	1.118	1.240
8	Jawa Barat	1.240	6.760	8.000
9	Jawa Tengah	1.303	7.817	9.120
10	Jawa Timur	2.904	13.296	16.200
11	Kalimantan Barat	202	518	720
12	Kalimantan Selatan	34	286	320
13	Kalimantan Tengah	25	135	160
14	Kalimantan Timur	14	146	160
15	Kalimantan Utara	95	305	400
16	Kepulauan Bangka Belitung	15	185	200
17	Lampung	66	534	600
18	Maluku		40	40
19	Nusa Tenggara Barat	112	608	720
20	Nusa Tenggara Timur	143	897	1.040

No	Provinsi	Jenis Kelamin		Jumlah
		Perempuan	Laki-Laki	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
21	Papua	58	142	200
22	Papua Barat	51	109	160
23	Riau	70	210	280
24	Sulawesi Barat	58	302	360
25	Sulawesi Selatan	182	1.258	1.440
26	Sulawesi Tengah	59	861	920
27	Sulawesi Tenggara	126	554	680
28	Sulawesi Utara	150	250	400
29	Sumatera Barat	61	1.019	1.080
30	Sumatera Selatan	120	920	1.040
31	Sumatera Utara	173	1.227	1.400
<b>Jumlah</b>		<b>8.138</b>	<b>43.582</b>	<b>51.720</b>

Sumber: Ditjen Binapenta dan PKK, diolah Pusdatik Kemnaker

### 3.12 Data Tenaga Kerja Mandiri/Wirausaha

#### 3. 12. 1. Jumlah Paket Penerima Bantuan Tenaga Kerja Mandiri Pemula Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin Tahun 2023

No	Provinsi	Jenis Kelamin		Grand Total
		Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	427	323	750
2	Bali	545	395	940
3	Banten	1.936	1.894	3.830
4	Bengkulu	447	513	960
5	DI Yogyakarta	508	662	1.170
6	DKI Jakarta	3.054	3.986	7.040
7	Gorontalo	152	138	290
8	Jambi	1.451	1.819	3.270
9	Jawa Barat	9.263	7.477	16.740
10	Jawa Tengah	10.137	6.883	17.020
11	Jawa Timur	15.543	13.787	29.330
12	Kalimantan Barat	985	1.105	2.090
13	Kalimantan Selatan	37	53	90
14	Kalimantan Tengah	33	67	100
15	Kalimantan Timur	96	134	230
16	Kalimantan Utara	587	534	1.121
17	Kepulauan Bangka Belitung	152	228	380
18	Lampung	1.223	907	2.130
19	Maluku	46	64	110
20	Maluku Utara	25	65	90
21	Nusa Tenggara Barat	539	601	1.140
22	Nusa Tenggara Timur	1.195	835	2.030

No	Provinsi	Jenis Kelamin		Grand Total
		Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
23	Papua	259	191	450
24	Papua Barat	116	94	210
25	Riau	64	106	170
26	Sulawesi Barat	570	630	1.200
27	Sulawesi Selatan	1.891	2.049	3.940
28	Sulawesi Tengah	403	437	840
29	Sulawesi Tenggara	618	562	1.180
30	Sulawesi Utara	462	548	1.010
31	Sumatera Barat	1.119	1.631	2.750
32	Sumatera Selatan	1.716	1.495	3.211
33	Sumatera Utara	1.784	1.956	3.740
<b>Grand Total</b>		<b>57.383</b>	<b>52.169</b>	<b>109.552</b>

Sumber: Ditjen Binapenta dan PKK, diolah Pusdatik Kemnaker

### 3. 12. 2. Jumlah Calon Tenaga Kerja Mandiri Lanjutan yang Mengikuti Pembekalan Menurut Provinsi Usaha dan Sektor Usaha Tahun 2023

No	Provinsi	Sektor Usaha					Grand Total
		Industri Boga	Industri Kreatif	Perdagangan Barang dan Jasa	Perikanan dan Kelautan	Pertanian dan Peternakan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Aceh	5	1	16	4	22	48
2	Bali	10	5	10	1	4	30
3	Banten	13	12	24	3	15	67
4	Bengkulu	2	3	1	4	5	15
5	DI Yogyakarta	4	1	1	1	2	9
6	DKI Jakarta	53	6	30		1	90
7	Gorontalo	6		1		3	10
8	Jambi	7		12	4	9	32
9	Jawa Barat	66	37	97	41	76	317
10	Jawa Tengah	69	54	156	69	258	606
11	Jawa Timur	112	81	197	52	294	736
12	Kalimantan Barat	38	14	37	9	64	162
13	Kalimantan Selatan	3	1				4
14	Kalimantan Tengah	1	4	8	2	4	19
15	Kalimantan Timur	8	1	6	8	6	29
16	Kalimantan Utara	4	3	9	7		23
17	Kepulauan Bangka Belitung	15	2	5	1	3	26
18	Kepulauan Riau		1	1			2
19	Lampung	3	3	6	6	6	24
20	Maluku	1		2			3
21	Maluku Utara	3		6		1	10
22	Nusa Tenggara Barat	14	12	12	3	22	63
23	Nusa Tenggara Timur			1	2	7	10
24	Papua	1		1	1	1	4
25	Riau	52	27	14	11	14	118
26	Sulawesi Barat	5	7	35	8	16	71
27	Sulawesi Selatan	9	17	26	3	37	92
28	Sulawesi Tengah	4	1	15			20
29	Sulawesi Tenggara	6	7	33	10	18	74
30	Sulawesi Utara	3		4	1	2	10



No	Provinsi	Sektor Usaha					Grand Total
		Industri Boga	Industri Kreatif	Perdagangan Barang dan Jasa	Perikanan dan Kelautan	Pertanian dan Peternakan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
31	Sumatera Barat	23	5	29	1	8	66
32	Sumatera Selatan	18	8	27	31	39	123
33	Sumatera Utara	8	2	10	3	13	36
<b>Grand Total</b>		<b>566</b>	<b>315</b>	<b>832</b>	<b>286</b>	<b>950</b>	<b>2.949</b>

Sumber: Ditjen Binapenta dan PKK, diolah Pusdatik Kemnaker

### 3.13 Data Tenaga Kerja yang Dipekerjakan Oleh Tenaga Kerja Mandiri Lanjutan

#### 3.13.1. Jumlah Tenaga Kerja Pendamping Tenaga Kerja Mandiri Lanjutan Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin Tahun 2023

Provinsi	Jenis Kelamin		Grand Total
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	1	1	2
Bali		1	1
Banten	1	1	2
DI Yogyakarta		1	1
DKI Jakarta	1	2	3
Gorontalo	1		1
Jambi	1		1
Jawa Barat	7	3	10
Jawa Tengah	13	6	19
Jawa Timur	18	6	24
Kalimantan Barat	4	2	6
Kalimantan Timur		1	1
Kepulauan Bangka Belitung	1		1
Lampung	3		3
Nusa Tenggara Barat	1		1
Nusa Tenggara Timur	1	1	2
Papua Barat	1		1
Riau		1	1
Sulawesi Barat	1	1	2
Sulawesi Selatan	1	2	3
Sulawesi Tengah		1	1
Sulawesi Tenggara	5		5
Sumatera Barat	2	1	3
Sumatera Selatan	2	3	5
Sumatera Utara		1	1
<b>Grand Total</b>	<b>65</b>	<b>35</b>	<b>100</b>

Sumber: Ditjen Binapenta dan PKK, diolah Pusdatik Kemnaker

### 3.14 Data BLK Komunitas yang Menjadi Inkubator Wirausaha

#### 3. 14. 1. Jumlah BLK Komunitas yang Menjadi Inkubator Wirausaha Berdasarkan Provinsi dan Kejuruan Tahun 2023

No	Kejuruan	Provinsi						Grand Total
		Banten	Jawa Barat	Jawa Tengah	Jawa Timur	Lampung	Sulawesi Barat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Bahasa				1			1
2	Desain Komunikasi Visual				1			1
3	Desain Mode Dan Tekstil (Tata Busana)		2		2			4
4	Junior Graphic Design		1					1
5	Las		1					1
6	Multimedia		1		1			2
7	Otomotif			1				1
8	Pengolahan Hasil Pertanian (Agroindustri)				3			3
9	Senikuliner		1					1
10	Tata Busana			5				5
11	Teknik Informatika	3	4	3	15	1		26
12	Teknik Las (Welding)			1	3			4
13	Teknik Otomotif	1			1			2
14	Teknik Sepeda Motor		1					1
15	Teknologi Informasi Dan Komunikasi	1	1	15	4		1	22
<b>Grand Total</b>		<b>5</b>	<b>12</b>	<b>25</b>	<b>31</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>75</b>

Sumber: Ditjen Binapenta dan PKK, diolah Pusdatik Kemnaker

### 3.15 Data Tenaga Kerja Pendamping TKA

#### 3. 15. 1. Jumlah Tenaga Kerja Pendamping Tenaga Kerja Asing Tahun 2023

Sektor	Jumlah
(1)	(2)
Jasa	58.706
Industri	63.947
Pertanian Maritim	5.050
<b>Total</b>	<b>127.703</b>

Sumber: Ditjen Binapenta dan PKK, diolah Pusdatik Kemnaker

### 3.16 Data TKA yang Diterbitkan

#### 3. 16. 1. Jumlah Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan Menurut Jenis Usaha Tahun 2023

Jenis Usaha (1)	Jumlah (2)
Industri	80.661
Jasa	82.649
Pertanian dan Maritim	4.738
<b>Total</b>	<b>168.048</b>

Sumber: Ditjen Binapenta dan PKK, diolah Pusdatik Kemnaker

#### 3. 16. 2. Jumlah Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan Menurut Level Jabatan Tahun 2023

Level Jabatan (1)	Jumlah (2)
Advisor/Consultant	36.053
Direksi	10.886
Komisaris	899
Manager	30.367
Profesional	89.843
<b>Total</b>	<b>168.048</b>

Sumber: Ditjen Binapenta dan PKK, diolah Pusdatik Kemnaker

#### 3. 16. 3. Jumlah Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan Menurut Negara Tahun 2023

Negara (1)	Jumlah (2)
Amerika Serikat	3.585
Australia	2.892
India	8.747
Inggris	3.086
Jepang	15.961
Korea Selatan	15.660
Malaysia	5.794
Philippina	4.742
Republik Rakyat China	82.623
Singapura	2.090
Lain lain	22.868
<b>Total</b>	<b>168.048</b>

Sumber: Ditjen Binapenta dan PKK, diolah Pusdatik Kemnaker

**3. 16. 4. Jumlah Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan Menurut Provinsi Tahun 2023**

<b>Provinsi</b>	<b>Jumlah</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>
Aceh	81
Bali	5.097
Bangka Belitung	986
Banten	6.330
Bengkulu	42
Daerah Istimewa Yogyakarta	166
DKI Jakarta	13.862
Gorontalo	23
Jambi	127
Jawa Barat	10.807
Jawa Tengah	2.964
Jawa Timur	3.907
Kalimantan Barat	279
Kalimantan Selatan	259
Kalimantan Tengah	157
Kalimantan Timur	211
Kalimantan Utara	169
Kepulauan Riau	5.268
Lampung	118
Maluku	6.382
Maluku Utara	6.364
Nusa Tenggara Barat	764
Nusa Tenggara Timur	176
Papua	468
Papua Barat	71
Riau	5.517
Sulawesi Barat	12
Sulawesi Selatan	555
Sulawesi Tengah	18.678
Sulawesi Tenggara	3.481
Sulawesi Utara	259
Sumatera Barat	82
Sumatera Selatan	528
Sumatera Utara	888
Lintas Provinsi	72.970
<b>Total</b>	<b>168.048</b>

Sumber: Ditjen Binapenta dan PKK, diolah Pusdatik Kemnaker

### 3.17 Data Pengantar Kerja

#### 3. 17. 1. Jumlah Fungsional Pengantar Kerja Berdasarkan Provinsi dan Jenis Kelamin Tahun 2023

Penempatan (1)	Jenis Kelamin		Grand Total (4)
	Laki-laki (2)	Perempuan (3)	
ACEH	4	4	8
BALI	19	14	33
BANTEN	20	12	32
BENGKULU	6	5	11
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	11	19	30
DKI JAKARTA	111	123	234
GORONTALO	3	7	10
HONGKONG		1	1
JAMBI	11	15	26
JAWA BARAT	78	60	138
JAWA TENGAH	54	87	141
JAWA TIMUR	67	58	125
JORDANIA	1		1
KALIMANTAN BARAT	16	12	28
KALIMANTAN SELATAN	8	5	13
KALIMANTAN TENGAH	13	13	26
KALIMANTAN TIMUR	8	15	23
KALIMANTAN UTARA	3	4	7
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	11	5	16
KEPULAUAN RIAU	9	15	24
KOREA		1	1
LAMPUNG	13	14	27
MALAYSIA	1		1
MALUKU	2	3	5
MALUKU UTARA	1	2	3
NUSA TENGGARA BARAT	23	9	32
NUSA TENGGARA TIMUR	17	14	31
PAPUA BARAT		3	3
PAPUA TENGAH	1		1
RIAU	8	9	17
SULAWESI BARAT	3	6	9
SULAWESI SELATAN	30	50	80
SULAWESI TENGAH	5	9	14
SULAWESI TENGGARA	10	9	19
SULAWESI UTARA	3	4	7
SUMATERA BARAT	21	37	58
SUMATERA SELATAN	12	24	36
SUMATERA UTARA	18	21	39
TAIWAN		1	1
<b>Grand Total</b>	<b>621</b>	<b>690</b>	<b>1.311</b>

Sumber: Ditjen Binapenta dan PKK, diolah Pusdatik Kemnaker

#### 3. 17. 2. Jumlah Fungsional Pengantar Kerja Berdasarkan Provinsi dan Instansi Penempatan Tahun 2023

PENEMPATAN	PUSAT					DAERAH			TOTAL
	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN				BP2MI	PROVINSI	KABUPATEN	KOTA	
	SEKRETARIAT JENDERAL	BARENBANG	DITJEN BINALAVOTTAS	DITJEN BINAPENTA DAN PKK					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
ACEH			2		4		1	1	8
BALI					4	5	20	4	33
BANTEN			3		7	3	3	16	32
BENGKULU						3	7	1	11
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA					6	5	13	6	30
DKI JAKARTA	8	4	1	102	82	14		23	234
GORONTALO							8	2	10
HONGKONG				1					1
JAMBI						6	17	3	26
JAWA BARAT			8	14	10	6	64	36	138
JAWA TENGAH			4		12	11	88	26	141
JAWA TIMUR			4		8	14	75	24	125
JORDANIA				1					1
KALIMANTAN BARAT					5	5	16	2	28
KALIMANTAN SELATAN					4	1	4	4	13
KALIMANTAN TENGAH						4	14	8	26
KALIMANTAN TIMUR			3				9	11	23
KALIMANTAN UTARA					2		4	1	7
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG			2			1	11	2	16
KEPULAUAN RIAU					5	3	7	9	24
KOREA				1					1
LAMPUNG					6	5	14	2	27
MALAYSIA				1					1
MALUKU			1			1		3	5
MALUKU UTARA			1					2	3
NUSA TENGGARA BARAT			2		6	3	19	2	32
NUSA TENGGARA TIMUR					5	5	21		31
PAPUA BARAT			2			1			3
PAPUA TENGAH							1		1
RIAU					4	2	8	3	17
SULAWESI BARAT						6	3		9
SULAWESI SELATAN			6		3	15	45	11	80
SULAWESI TENGAH					1	1	12		14
SULAWESI TENGGARA			3		1		13	2	19
SULAWESI UTARA					3	1	3		7
SUMATERA BARAT			2		3	13	27	13	58
SUMATERA SELATAN					3		23	10	36
SUMATERA UTARA			2		6	2	18	11	39
TAIWAN				1					1
<b>Grand Total</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>46</b>	<b>121</b>	<b>190</b>	<b>136</b>	<b>568</b>	<b>238</b>	<b>1.311</b>

Sumber: Ditjen Binapenta dan PKK, diolah Pusdatik Kemnaker

### 3.18 Data Petugas Antar Kerja

#### 3.18.1. Jumlah Petugas Antar Kerja Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin Tahun 2023

No	Provinsi	Jenis Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Bali	12	9	21
2	Bangka Belitung	4	1	5

No	Provinsi	Jenis Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Banten	45	19	64
4	DI Yogyakarta	17	9	26
5	DKI Jakarta	10	14	24
6	Gorontalo	15	9	24
7	Jambi	18	14	32
8	Jawa Barat	44	8	52
9	Jawa Tengah	6	3	9
10	Jawa Timur	11	8	19
11	Kalimantan Barat	1	4	5
12	Kalimantan Selatan	6	3	9
13	Kalimantan Tengah	14	7	21
14	Kalimantan Timur	18	17	35
15	Kepulauan Riau	6	1	7
16	Lampung	10	7	17
17	Aceh	35	29	64
18	Nusa Tenggara Barat	7	3	10
19	Nusa Tenggara Timur	2	1	3
20	Papua	1	5	6
21	Riau	10	3	13
22	Sulawesi Selatan	1		1
23	Sulawesi Tenggara		3	3
24	Sumatera Barat	6	6	12
25	Sumatera Selatan	2		2
26	Sumatera Utara	1	7	8
<b>Grand Total</b>		<b>302</b>	<b>190</b>	<b>492</b>

Sumber: Ditjen Binapenta dan PKK, diolah Pusdatik Kemnaker

### 3.19 Data Informasi Jabatan

#### 3. 19. 1. Jumlah Jabatan Berdasarkan Kategori/Sektor Tahun 2023

No	Kategori/Sektor	Jumlah Jabatan
(1)	(2)	(3)
1	A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	481
2	B Pertambangan dan Penggalian	1.290
3	C Industri Pengolahan	3.721
4	D Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	673
5	E Treatment Air, Treatment Air Limbah, Treatment Dan Pemulihan Material Sampah, Dan Aktivitas Remediasi	2
6	F Konstruksi	225
7	G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	149
8	H Pengangkutan dan Pergudangan	356
9	I Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	209
10	J Informasi dan Komunikasi	154
11	K Aktivitas Keuangan dan Asuransi	290

No (1)	Kategori/Sektor (2)	Jumlah Jabatan (3)
12	M Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis	17
13	N Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan Dan Penunjang Usaha Lainnya	234
14	O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	588
15	P Pendidikan	114
16	Q Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	31
17	R Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	518
18	S Aktivitas Jasa Lainnya	-
<b>Jumlah</b>		<b>9.052</b>

Sumber: Ditjen Binapenta dan PKK, diolah Pusdatik Kemnaker

### 3.20 Data Pencari Kerja Terdaftar

#### 3. 20. 1. Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin Tahun 2023\*\*\*

Provinsi (1)	Pencari Kerja Terdaftar		
	Laki-laki (2)	Perempuan (3)	Jumlah (4)
ACEH	8.742	5.235	13.977
SUMATERA UTARA	28.257	24.285	52.542
SUMATERA BARAT	18.751	17.534	36.285
RIAU	16.517	8.535	25.052
JAMBI	14.881	8.343	23.224
SUMATERA SELATAN	30.774	17.400	48.174
BENGKULU	4.982	3.245	8.227
LAMPUNG	20.201	22.524	42.725
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	3.075	2.422	5.497
KEPULAUAN RIAU	12.407	9.739	22.146
DKI JAKARTA	56.518	28.867	85.385
JAWA BARAT	296.917	245.233	542.150
JAWA TENGAH	117.716	100.297	218.013
DI YOGYAKARTA	10.930	8.062	18.992
JAWA TIMUR	127.094	93.294	220.388
BANTEN	74.545	50.965	125.510
BALI	11.864	8.183	20.047
NUSA TENGGARA BARAT	40.643	12.211	52.854
NUSA TENGGARA TIMUR	6.411	8.229	14.640
KALIMANTAN BARAT	13.148	8.848	21.996
KALIMANTAN TENGAH	12.154	5.145	17.299
KALIMANTAN SELATAN	11.441	3.774	15.215
KALIMANTAN TIMUR	12.735	4.186	16.921
KALIMANTAN UTARA	2.709	1.848	4.557
SULAWESI UTARA	5.735	4.786	10.521
SULAWESI TENGAH	15.391	7.118	22.509
SULAWESI SELATAN	43.432	23.528	66.960
SULAWESI TENGGARA	10.200	6.118	16.318
GORONTALO	2.150	1.424	3.574
SULAWESI BARAT	5.075	3.103	8.178
MALUKU	6.842	4.251	11.093
MALUKU UTARA	16.209	6.681	22.890
PAPUA BARAT	1.467	1.226	2.693



Provinsi	Pencari Kerja Terdaftar		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
PAPUA	1.957	1.321	3.278
<b>JUMLAH</b>	<b>1.061.870</b>	<b>757.960</b>	<b>1.819.830</b>

Sumber: Kementerian Ketenagakerjaan

Keterangan: \*\*Data sangat sementara

Data Pencari Kerja terdaftar berdasarkan Provinsi Domisili dan NIK

### 3.21 Data Lowongan Kerja Terdaftar

#### 3. 21. 1. Jumlah Lowongan Kerja Terdaftar Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin Tahun 2023\*\*\*

Provinsi	Lowongan Kerja Terdaftar			
	Laki-laki	Perempuan	Laki-Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ACEH	577	570	1.123	2.270
SUMATERA UTARA	3.693	2.203	4.496	10.392
SUMATERA BARAT	19.148	1.368	3.626	24.142
RIAU	546	227	297	1.070
JAMBI	2.966	1.588	289	4.843
SUMATERA SELATAN	2.733	1.896	937	5.566
BENGKULU	1.014	485	77	1.576
LAMPUNG	1.473	1.377	829	3.679
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	428	192	346	966
KEPULAUAN RIAU	221	29	1.706	1.956
DKI JAKARTA	7.632	5.170	16.739	29.541
JAWA BARAT	21.782	13.764	123.154	158.700
JAWA TENGAH	16.711	18.480	19.895	55.086
DI YOGYAKARTA	1.261	786	8.757	10.804
JAWA TIMUR	29.453	21.710	17.508	68.671
BANTEN	3.792	3.905	4.860	12.557
BALI	1.024	770	6.712	8.506
NUSA TENGGARA BARAT	1.980	687	19.046	21.713
NUSA TENGGARA TIMUR	1.761	1.435	332	3.528
KALIMANTAN BARAT	1.743	1.268	417	3.428
KALIMANTAN TENGAH	1.333	74	209	1.616
KALIMANTAN SELATAN	444	79	1.343	1.866
KALIMANTAN TIMUR	385	190	8.075	8.650
KALIMANTAN UTARA	861	696	46	1.603
SULAWESI UTARA	1.078	725	802	2.605
SULAWESI TENGAH	1.851	481	408	2.740
SULAWESI SELATAN	3.463	2.166	2.462	8.091
SULAWESI TENGGARA	1.193	789	864	2.846
GORONTALO	150	156	318	624
SULAWESI BARAT	972	664	147	1.783
MALUKU	116	52	62	230
MALUKU UTARA	135	33	96	264
PAPUA BARAT	206	168	179	553
PAPUA	344	320	272	936
<b>JUMLAH</b>	<b>132.469</b>	<b>84.503</b>	<b>246.429</b>	<b>463.401</b>

Sumber: Kementerian Ketenagakerjaan

Keterangan: \*\*\*Data sangat sementara

### 3.22 Data Tenaga Kerja Terdaftar Ditempatkan

#### 3. 22. 1. Jumlah Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin Tahun 2023\*\*\*

Provinsi	Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
ACEH	838	608	1.446
SUMATERA UTARA	4.862	2.611	7.473
SUMATERA BARAT	3.670	1.864	5.534
RIAU	2.111	791	2.902
JAMBI	3.708	1.762	5.470
SUMATERA SELATAN	5.195	2.977	8.172
BENGKULU	935	544	1.479
LAMPUNG	2.423	3.042	5.465
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	637	293	930
KEPULAUAN RIAU	1.834	1.349	3.183
DKI JAKARTA	10.146	5.670	15.816
JAWA BARAT	39.225	34.700	73.925
JAWA TENGAH	24.731	23.519	48.250
DI YOGYAKARTA	2.308	1.465	3.773
JAWA TIMUR	33.852	22.319	56.171
BANTEN	9.224	5.505	14.729
BALI	1.360	1.065	2.425
NUSA TENGGARA BARAT	2.145	866	3.011
NUSA TENGGARA TIMUR	2.064	2.912	4.976
KALIMANTAN BARAT	2.567	1.484	4.051
KALIMANTAN TENGAH	1.330	278	1.608
KALIMANTAN SELATAN	1.348	246	1.594
KALIMANTAN TIMUR	1.855	376	2.231
KALIMANTAN UTARA	991	729	1.720
SULAWESI UTARA	1.347	844	2.191
SULAWESI TENGAH	4.874	961	5.835
SULAWESI SELATAN	9.639	3.330	12.969
SULAWESI TENGGARA	2.551	961	3.512
GORONTALO	257	180	437
SULAWESI BARAT	1.396	806	2.202
MALUKU	853	165	1.018
MALUKU UTARA	1.978	199	2.177
PAPUA BARAT	277	197	474
PAPUA	436	341	777
<b>JUMLAH</b>	<b>182.967</b>	<b>124.959</b>	<b>307.926</b>

Sumber: Kementerian Ketenagakerjaan

Keterangan: \*\*\*Data sangat sementara

Data Tenaga Kerja yang ditempatkan berdasarkan Provinsi Domisili dan NIK

# **BAB IV**

## **DATA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA**



Tabel 4. 1 Jumlah Perusahaan Terdaftar WLKP yang Melaporkan Memiliki Struktur Skala Upah Menurut Provinsi, sampai dengan 31 Desember 2023<sup>1</sup>

Provinsi (1)	Status Penerapan Struktur Skala Upah (SUSU)		Total (4)
	Menerapkan (2)	Belum Menerapkan (3)	
Aceh	260	29.941	30.201
Bali	2.912	64.973	67.885
Banten	4.774	122.964	127.738
Bengkulu	187	15.366	15.553
Daerah Istimewa Yogyakarta	945	30.467	31.412
Dki Jakarta	23.535	332.493	356.028
Gorontalo	79	7.004	7.083
Jambi	577	23.374	23.951
Jawa Barat	10.339	326.954	337.293
Jawa Tengah	3.555	149.706	153.261
Jawa Timur	4.066	238.171	242.237
Kalimantan Barat	529	37.618	38.147
Kalimantan Selatan	499	33.837	34.336
Kalimantan Tengah	362	21.987	22.349
Kalimantan Timur	1.005	47.235	48.240
Kalimantan Utara	89	9.512	9.601
Kepulauan Bangka Belitung	240	12.233	12.473
Kepulauan Riau	1.570	33.317	34.887
Lampung	381	44.357	44.738
Maluku	1.139	10.117	11.256
Maluku Utara	41	8.093	8.134
Nusa Tenggara Barat	375	27.608	27.983

<sup>1</sup> Perusahaan yang terklasifikasi memiliki SUSU merupakan perusahaan yang terdaftar WLKP, melapor memiliki SUSU, melapor min. 1 Tenaga Kerja, dan berstatus sebagai Perusahaan Pusat

Provinsi (1)	Status Penerapan Struktur Skala Upah (SUSU)		Total
	Menerapkan (2)	Belum Menerapkan (3)	
Nusa Tenggara Timur	198	35.354	35.552
Papua	202	16.787	16.989
Papua Barat	99	10.230	10.329
Riau	2.104	45.619	47.723
Sulawesi Barat	29	9.608	9.637
Sulawesi Selatan	686	68.682	69.368
Sulawesi Tengah	188	22.743	22.931
Sulawesi Tenggara	162	23.350	23.512
Sulawesi Utara	199	18.925	19.124
Sumatera Barat	519	33.791	34.310
Sumatera Selatan	533	43.002	43.535
Sumatera Utara	1.697	70.642	72.339
<b>Tidak Teridentifikasi</b>	<b>266</b>	<b>90.866</b>	<b>91.132</b>
<b>Total</b>	<b>64.341</b>	<b>2.116.926</b>	<b>2.181.267</b>

Sumber: Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP), update 31 Desember 2023

Tabel 4. 2 Jumlah Perusahaan Terdaftar WLKP yang Melaporkan Memiliki Peraturan Perusahaan / Perjanjian Kerja Bersama Menurut Provinsi, sampai dengan 31 Desember 2023<sup>2</sup>

Provinsi (1)	Memiliki PP (2)	Memiliki PKB (3)	Belum Memiliki/Tidak Melaporkan PP/PKB (4)	Total (5)
Aceh	172	113	29.916	30.201
Bali	1388	679	65.818	67.885
Banten	2924	1163	123.651	127.738
Bengkulu	155	57	15.341	15.553
Daerah Istimewa Yogyakarta	614	284	30.514	31.412
Dki Jakarta	14160	4302	337.566	356.028
Gorontalo	62	11	7.010	7.083
Jambi	376	194	23.381	23.951
Jawa Barat	6745	2858	327.690	337.293
Jawa Tengah	2332	1082	149.847	153.261
Jawa Timur	3032	1398	237.807	242.237
Kalimantan Barat	330	148	37.669	38.147
Kalimantan Selatan	306	126	33.904	34.336
Kalimantan Tengah	216	121	22.012	22.349
Kalimantan Timur	664	318	47.258	48.240
Kalimantan Utara	56	30	9.515	9.601
Kepulauan Bangka Belitung	203	68	12.202	12.473
Kepulauan Riau	992	440	33.455	34.887
Lampung	277	131	44.330	44.738
Maluku	141	84	11.031	11.256
Maluku Utara	24	8	8.102	8.134
Nusa Tenggara Barat	164	119	27.700	27.983
Nusa Tenggara Timur	95	52	35.405	35.552

<sup>2</sup> Perusahaan yang terklasifikasi memiliki PP/PKB merupakan perusahaan yang terdaftar WLKP, melapor memiliki PP/PKB, melapor min. 1 Tenaga Kerja, dan berstatus sebagai Perusahaan Pusat

Provinsi (1)	Memiliki PP (2)	Memiliki PKB (3)	Belum Memiliki/Tidak Melaporkan PP/PKB (4)	Total (5)
Papua	113	55	16.821	16.989
Papua Barat	71	40	10.218	10.329
Riau	1346	614	45.763	47.723
Sulawesi Barat	20	17	9.600	9.637
Sulawesi Selatan	387	231	68.750	69.368
Sulawesi Tengah	144	55	22.732	22.931
Sulawesi Tenggara	77	37	23.398	23.512
Sulawesi Utara	157	85	18.882	19.124
Sumatera Barat	324	163	33.823	34.310
Sumatera Selatan	372	223	42.940	43.535
Sumatera Utara	1082	545	70.712	72.339
<b>Tidak Teridentifikasi</b>	<b>159</b>	<b>89</b>	<b>90.884</b>	<b>91.132</b>
<b>Total</b>	<b>39.680</b>	<b>15.940</b>	<b>2.125.647</b>	<b>2.181.267</b>

Sumber: Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP), update 31 Desember 2023



Tabel 4. 3 Jumlah Data Perselisihan yang Ditangani dan Diselesaikan oleh Mediator Menurut Jenis Kasus Perselisihan HI dan Status Penyelesaian, Tahun 2023

Jenis Kasus	Jumlah Kasus	Penyelesaian				Sisa Kasus
		Bipartit	Mediasi <sup>3</sup>	Hakim HI	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perselisihan Hak	2.554	488	1.981	-	2.469	85
Perselisihan Kepentingan	387	86	270	-	356	31
Perselisihan PHK	7.275	1.153	5.942	3	7.098	177
Perselisihan Antar Serikat Pekerja / Serikat Buruh	51	7	43	-	50	1
<b>Total</b>	<b>10.267</b>	<b>1.734</b>	<b>8.236</b>	<b>3</b>	<b>9.973</b>	<b>294</b>

Sumber: Ditjen. Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsos TK, update sampai 31 Desember 2023

<sup>3</sup> Mediasi Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut mediasi adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral.

Tabel 4. 4 Jumlah Penutupan Perusahaan Terdaftar WLKP Menurut Provinsi, sampai dengan 31 Desember 2023<sup>4</sup>

Provinsi	Jumlah
(1)	(2)
Aceh	-
Bali	22
Banten	63
Bengkulu	-
Daerah Istimewa Yogyakarta	19
Dki Jakarta	141
Gorontalo	-
Jambi	5
Jawa Barat	103
Jawa Tengah	21
Jawa Timur	27
Kalimantan Barat	5
Kalimantan Selatan	34
Kalimantan Tengah	3
Kalimantan Timur	1
Kalimantan Utara	-
Kepulauan Bangka Belitung	7
Kepulauan Riau	9
Lampung	6
Maluku	1
Maluku Utara	-
Nusa Tenggara Barat	1

<sup>4</sup> Perusahaan yang dihitung merupakan perusahaan terdaftar di WLKP dan berstatus masih aktif

Provinsi	Jumlah
(1)	(2)
Nusa Tenggara Timur	-
Papua	-
Papua Barat	-
Riau	4
Sulawesi Barat	-
Sulawesi Selatan	7
Sulawesi Tengah	1
Sulawesi Tenggara	-
Sulawesi Utara	-
Sumatera Barat	1
Sumatera Selatan	5
Sumatera Utara	12
Tidak Teridentifikasi	2
<b>Total</b>	<b>500</b>

Sumber: Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP), update 31 Desember 2023



# **BAB V**

## **DATA BIDANG PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN K3**



## 5.1 Lembaga Pengawasan Ketenagakerjaan di Indonesia

**Tabel 5.1 Jumlah Lembaga Pengawasan Ketenagakerjaan di Indonesia menurut Provinsi Tahun 2023**

No.	Provinsi	Bidang	UPTD/Korwil	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan	3 Korwil	Kesepakatan Hasil Rakorda
2	Sumatera Utara	Bidang Perlindungan Ketenagakerjaan	6 UPT	Pergub No. 6 Tahun 2018
3	Sumatera Barat	Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan	3 UPT	
4	Riau	Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan	4 UPT	Pergub No. 50 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
5	Jambi	Bidang Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial	3 UPTD	Pergub No. 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Disnakertrans Prov. Jambi
6	Sumatera Selatan	Bidang Pembinaan Pengawasan Norma Ketenagakerjaan	Belum Terbentuk	Perda Prov. Sumsel No. 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Pergub Prov. Sumsel No. 40 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas
7	Bengkulu	Bidang Hubungan Industrial Pengawasan Ketenagakerjaan	3 UPTD	Pergub Bengkulu No. 67 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah
8	Lampung	Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan	Belum Terbentuk	
9	Kep. Bangka Belitung	Bidang Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Hubungan Industrial, dan Jamsos	1 Korwil	
10	Kep. Riau	Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan	2 UPTD	Pergub Kepri No. 53 Tahun 2017
11	DKI Jakarta	Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan	Belum Terbentuk	Pergub No. 271 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Struktur Tatakerja

No.	Provinsi	Bidang	UPTD/Korwil	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12	Jawa Barat	Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan	5 UPTD	1. Perda Pro Jabar N0. 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Prov. Jabar 2. Pergub Jabar No. 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Di lingkungan Pemprov. Jabar 3. Pergub Jabar No. 88 Tahun 2016 Tentang Tupoksi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 4. Pergub Jabar No. 69 Tahun 2017 Tentang Pembentukan UPTD Disnakertrans 5. Pergub Jabar No. 78 Tahun 2017 Tentang Tupoksi di UPTD Disnakertrans
13	Jawa Tengah	Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan	6 Satwasnaker (Kelas B)	Pergub No. 103 Tahun 2016 Tentang Organiasai dan Tatakerja UPT Disnakertrans Provinsi Jateng
14	DI. Yogyakarta	Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja	Tidak Membentuk UPT	Pergub DIY No. 62 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
15	Jawa Timur	Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3	6 Korwil	Dasar Hukum Korwil SK Kepala Dinas No. 560/1140/108.5/2017 Tentang Penunjukan Pengurus Korwil Pengawasan KK di Jatim
16	Banten	Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan	4 UPTD	Pergub No. 19 Tahun 2018 Tentang UPT Cabang Dinas
17	Bali	Bidang BHI dan Pengawasan Tenaga Kerja	Tidak Membentuk UPT	Perda No. 10 Tahun 2016 dan Pergub No. 84
18	Nusa Tenggara Barat	Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan	2 UPTD	Pergub No. 53 Tahun 2016 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Daerah Provinsi NTB
19	Nusa Tenggara Timur	Bidang PHI dan Pengawasan Ketenagakerjaan	4 Korwil	
20	Kalimantan Barat	Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan	2 UPTD	Dalam Proses
21	Kalimantan Tengah	Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan	2 UPTD	Pergub No. 57 Tahun 2017



No.	Provinsi	Bidang	UPTD/Korwil	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
22	Kalimantan Selatan	Bidang Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan	4 UPTD	Pergub No. 143 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan
23	Kalimantan Timur	Bidang Pembinaan dan Pengawasan	3 Korwil	
24	Kalimantan Utara	Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan		Pergub No. 21 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara
25	Sulawesi Utara	Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan	1 UPTD Balai Pengawasan Tenaga Kerja 4 Korwil	Perda No. 04 Tahun 2016 , dan SK Kepala Dinas No. 560/DTKT.V/02/2017 Tahun 2017
26	Sulawesi Tengah	Bidang Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3	2 UPTD	
27	Sulawesi Selatan	Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan	4 UPTD	Pergub Sulsel No. 18 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata kerja Unit pelaksana Teknis Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan Kerja Wilayah Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan
28	Sulawesi Tenggara	Bidang Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan Kerja	Belum Terbentuk	Pergub No. 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Disnaker Sultra
29	Gorontalo	Bidang Transmigrasi	3 Korwil	Perda No. 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dinas Daerah Provinsi Gorontalo
30	Sulawesi Barat	Bidang Pengawasan dan Pembinaan Ketenagakerjaan	2 UPTD	Pergub Sulbar No. 41 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat
31	Maluku	Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan	5 Balai Pengawas Ketenagakerjaan	Pergub No. 39 Tahun 2017 Tentang Kedudukan dan Susunan UPTD Wasnaker Maluku Utara
32	Maluku Utara	Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan	2 UPTD	Pergub No. 39 Tahun 2017 Tentang Kedudukan dan Susunan UPTD Wasnaker Maluku Utara

No.	Provinsi	Bidang	UPTD/Korwil	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
33	Papua Barat	Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan	2 UPTD	Pergub Masih Dalam Proses
34	Papua	Tidak Ada Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan	1 UPTD	

Sumber: Ditjen Binwasnaker & K3, Kemnaker RI

Keterangan:

- Kompilasi administrasi dari Dinas yang Membidangi Ketenagakerjaan Provinsi
- Belum ada penambahan pembentukan Lembaga Pengawasan yang baru di Tahun 2023

## 5.2 Lembaga Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Tabel 5.2 Jumlah Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) menurut Provinsi dan Bidang Tahun 2023

No.	Provinsi	Bidang				Jumlah
		Konsultan dan Pembinaan K3	Fabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi, dan Instalasi Teknik K3	Pemeriksaan dan Pengujian Teknik K3	Pemeriksaan/ Pengujian dan/atau Pelayanan Kesehatan Kerja	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	1	-	2	1	4
2	Sumatera Utara	24	28	39	14	105
3	Sumatera Barat	9	-	4	1	14
4	Riau	31	11	43	9	94
5	Jambi	-	-	2	2	4
6	Sumatera Selatan	14	-	10	6	30
7	Bengkulu	-	-	-	-	-
8	Lampung	1	2	8	3	14
9	Kep. Bangka Belitung	-	-	1	1	2
10	Kep. Riau	47	-	57	7	111
11	DKI Jakarta	182	66	189	51	488
12	Jawa Barat	163	44	283	46	536
13	Jawa Tengah	33	3	83	20	139
14	DI. Yogyakarta	44	2	14	-	60
15	Jawa Timur	86	38	99	15	238
16	Banten	55	12	114	17	198
17	Bali	-	-	24	2	26
18	Nusa Tenggara Barat	-	1	1	-	2
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	21	2	23
21	Kalimantan Tengah	-	-	1	2	3
22	Kalimantan Selatan	-	1	1	2	4
23	Kalimantan Timur	39	-	42	21	102
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	-	-	2	2	4
26	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Selatan	12	-	16	1	29
28	Sulawesi Tenggara	-	-	-	1	1
29	Gorontalo	-	-	-	1	1
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-
33	Papua Barat	-	-	-	1	1
34	Papua	1	-	-	-	1
<b>Jumlah</b>		<b>742</b>	<b>208</b>	<b>1.056</b>	<b>228</b>	<b>2.234</b>

Sumber: Ditjen Binwasnaker & K3, Kemnaker RI

### 5.3 Perusahaan Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja (SMK3)

Tabel 5.3.1 Jumlah Perusahaan Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja (SMK3) menurut Provinsi dan Kategori Tingkat Pencapaian Penerapan s.d Triwulan IV Tahun 2023

No.	Provinsi	Kategori Tingkat Pencapaian Penerapan		Jumlah
		Tingkat Penilaian Baik	Tingkat Penilaian Memuaskan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	10	11	21
2	Sumatera Utara	23	43	66
3	Sumatera Barat	5	8	13
4	Riau	55	56	111
5	Jambi	4	6	10
6	Sumatera Selatan	11	40	51
7	Bengkulu	1	1	2
8	Lampung	2	5	7
9	Kep. Bangka Belitung	-	4	4
10	Kep. Riau	24	12	36
11	DKI Jakarta	128	237	365
12	Jawa Barat	94	218	312
13	Jawa Tengah	27	45	72
14	DI Yogyakarta	5	15	20
15	Jawa Timur	74	159	233
16	Banten	64	98	162
17	Bali	5	28	33
18	Nusa Tenggara Barat	7	4	11
19	Nusa Tenggara Timur	7	4	11
20	Kalimantan Barat	16	21	37
21	Kalimantan Tengah	3	11	14
22	Kalimantan Selatan	-	8	8
23	Kalimantan Timur	18	33	51
24	Kalimantan Utara	3	1	4
25	Sulawesi Utara	8	6	14
26	Sulawesi Tengah	-	1	1
27	Sulawesi Selatan	14	22	36
28	Sulawesi Tenggara	4	1	5
29	Gorontalo	-	1	1
30	Sulawesi Barat	-	3	3
31	Maluku	2	3	5
32	Maluku Utara	2	4	6
33	Papua Barat	-	6	6
34	Papua	5	7	12
35	Papua Tengah	-	1	1
<b>Jumlah</b>		<b>621</b>	<b>1.122</b>	<b>1.744</b>

Sumber: Ditjen Binwasnaker & K3, Kemnaker RI

#### 5.4 Perusahaan Penerima Penghargaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan Kecelakaan Nihil (*Zero Accident*)

Tabel 5.4.1. Jumlah Perusahaan Penerima Penghargaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) menurut Provinsi dan Penghargaan Tahun 2023

No.	Provinsi	Penghargaan				Jumlah
		Sertifikat Emas	Sertifikat Emas Dan Bendera Emas	Sertifikat Perak	Sertifikat Perak Dan Bendera Perak	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	9	8	26	1	44
2	Sumatera Utara	15	52	20	-	87
3	Sumatera Barat	3	14	1	4	22
4	Riau	20	49	49	-	118
5	Jambi	3	14	-	4	21
6	Sumatera Selatan	11	13	4	1	29
7	Bengkulu	-	2	-	-	2
8	Lampung	2	6	5	-	13
9	Kep. Bangka Belitung	7	4	-	-	11
10	Kepulauan Riau	5	13	15	1	34
11	DKI Jakarta	143	85	104	6	338
12	Jawa Barat	86	119	84	-	289
13	Jawa Tengah	21	27	37	-	85
14	DI Yogyakarta	7	2	8	-	17
15	Jawa Timur	74	83	70	-	227
16	Banten	34	50	37	2	123
17	Bali	14	4	3	-	21
18	Nusa Tenggara Barat	1	2	10	-	13
19	Nusa Tenggara Timur	2	1	4	-	7
20	Kalimantan Barat	19	7	11	-	37
21	Kalimantan Tengah	11	1	3	-	15
22	Kalimantan Selatan	6	6	2	-	14
23	Kalimantan Timur	16	20	18	-	54
24	Kalimantan Utara	1	1	3	-	5
25	Sulawesi Utara	2	5	9	-	16
26	Sulawesi Tengah	1	5	2	-	8
27	Sulawesi Selatan	13	13	16	1	43
28	Sulawesi Tenggara	3	2	10	-	15
29	Gorontalo	1	1	-	-	2
30	Sulawesi Barat	-	3	1	-	4
31	Maluku	1	1	1	-	3
32	Maluku Utara	6	1	1	-	8
33	Papua Barat	6	2	-	-	8
34	Papua	7	4	5	-	16
35	Papua Tengah	-	1	-	-	1
<b>Jumlah</b>		<b>550</b>	<b>621</b>	<b>559</b>	<b>20</b>	<b>1.750</b>

Sumber: Ditjen Binwasnaker & K3, Kemnaker RI

**Tabel 5.4.2. Jumlah Perusahaan Penerima Penghargaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) menurut Provinsi dan Kategori Tingkat Penerapan Tahun 2023**

No.	Provinsi	Kategori Tingkat Penerapan			Jumlah
		Awal (64 Kriteria)	Transisi (122 Kriteria)	Lanjutan (166 Kriteria)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	35	-	9	44
2	Sumatera Utara	35	-	52	87
3	Sumatera Barat	4	-	18	22
4	Riau	68	1	49	118
5	Jambi	3	-	18	21
6	Sumatera Selatan	14	1	14	29
7	Bengkulu	-	-	2	2
8	Lampung	7	-	6	13
9	Kep. Bangka Belitung	7	-	4	11
10	Kepulauan Riau	20	-	14	34
11	DKI Jakarta	237	10	91	338
12	Jawa Barat	160	10	119	289
13	Jawa Tengah	57	1	27	85
14	DI Yogyakarta	14	1	2	17
15	Jawa Timur	137	7	83	227
16	Banten	67	4	52	123
17	Bali	15	2	4	21
18	Nusa Tenggara Barat	11	-	2	13
19	Nusa Tenggara Timur	6	-	1	7
20	Kalimantan Barat	30	-	7	37
21	Kalimantan Tengah	14	-	1	15
22	Kalimantan Selatan	8	-	6	14
23	Kalimantan Timur	34	-	20	54
24	Kalimantan Utara	4	-	1	5
25	Sulawesi Utara	11	-	5	16
26	Sulawesi Tengah	2	1	5	8
27	Sulawesi Selatan	29	-	14	43
28	Sulawesi Tenggara	13	-	2	15
29	Gorontalo	1	-	1	2
30	Sulawesi Barat	1	-	3	4
31	Maluku	2	-	1	3
32	Maluku Utara	7	-	1	8
33	Papua Barat	6	-	2	8
34	Papua	12	-	4	16
35	Papua Tengah	-	-	1	1
<b>Jumlah</b>		<b>1.071</b>	<b>38</b>	<b>641</b>	<b>1.750</b>

Sumber: Ditjen Binwasnaker & K3, Kemnaker RI

**Tabel 5.4.3. Jumlah Perusahaan Penerima Penghargaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) menurut Provinsi dan Tingkat Pencapaian Penerapan Tahun 2023**

No.	Provinsi	Tingkat Pencapaian Penerapan		Jumlah
		Baik	Memuaskan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	27	17	44
2	Sumatera Utara	20	67	87
3	Sumatera Barat	5	17	22
4	Riau	50	68	118
5	Jambi	4	17	21
6	Sumatera Selatan	5	24	29
7	Bengkulu	-	2	2
8	Lampung	5	8	13
9	Kep. Bangka Belitung	-	11	11
10	Kepulauan Riau	16	18	34
11	DKI Jakarta	110	228	338
12	Jawa Barat	84	205	289
13	Jawa Tengah	38	47	85
14	DI Yogyakarta	8	9	17
15	Jawa Timur	69	158	227
16	Banten	39	84	123
17	Bali	3	18	21
18	Nusa Tenggara Barat	10	3	13
19	Nusa Tenggara Timur	4	3	7
20	Kalimantan Barat	11	26	37
21	Kalimantan Tengah	3	12	15
22	Kalimantan Selatan	2	12	14
23	Kalimantan Timur	18	36	54
24	Kalimantan Utara	3	2	5
25	Sulawesi Utara	9	7	16
26	Sulawesi Tengah	2	6	8
27	Sulawesi Selatan	17	26	43
28	Sulawesi Tenggara	10	5	15
29	Gorontalo	-	2	2
30	Sulawesi Barat	1	3	4
31	Maluku	1	2	3
32	Maluku Utara	1	7	8
33	Papua Barat	-	8	8
34	Papua	5	11	16
35	Papua Tengah	-	1	1
<b>Jumlah</b>		<b>580</b>	<b>1.170</b>	<b>1.750</b>

Sumber: Ditjen Binwasnaker & K3, Kemnaker RI

**Tabel 5.4.4 Jumlah Perusahaan Penerima Penghargaan Zero Accident menurut Provinsi Tahun 2023**

No.	Provinsi	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	Aceh	60
2	Sumatra Utara	258
3	Sumatra Barat	36
4	Riau	38
5	Jambi	43
6	Sumatra Selatan	59
7	Bengkulu	8
8	Lampung	11
9	Kep Bangka Belitung	6
10	Kepulauan Riau	16
11	DKI Jakarta	128
12	Jawa Barat	131
13	Jawa Tengah	75
14	DI Yogyakarta	21
15	Jawa Timur	256
16	Banten	114
17	Bali	7
18	Nusa Tenggara Barat	12
19	Nusa Tenggara Timur	7
20	Kalimantan Barat	20
21	Kalimantan Tengah	75
22	Kalimantan Selatan	116
23	Kalimantan Timur	234
24	Kalimantan Utara	8
25	Sulawesi Utara	4
26	Sulawesi Tengah	2
27	Sulawesi Selatan	37
28	Sulawesi Tenggara	21
29	Gorontalo	6
30	Sulawesi Barat	-
31	Maluku	1
32	Maluku Utara	-
33	Papua Barat	-
34	Papua	1
35	Papua Tengah	1
<b>Jumlah</b>		<b>1.812</b>

Sumber: Ditjen Binwasnaker & K3, Kemnaker RI



## 5.5 Perusahaan Terdaftar Wajib Laporkan Ketenagakerjaan Perusahaan

**Tabel 5.5 Jumlah Perusahaan Terdaftar WLKP Online di Indonesia  
Menurut Provinsi dan Skala Perusahaan  
s.d Triwulan IV Tahun 2023**

No.	Provinsi	Skala Perusahaan					Jumlah
		Mikro	Kecil	Menengah	Besar	Belum Teridentifikasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Aceh	21.654	3.431	747	241	4.128	30.201
2	Sumatera Utara	46.380	10.028	2.905	1.412	11.614	72.339
3	Sumatera Barat	24.749	4.392	1.077	354	3.738	34.310
4	Riau	32.661	5.413	1.771	1.058	6.820	47.723
5	Jambi	16.692	2.698	917	400	3.244	23.951
6	Sumatera Selatan	30.258	6.303	1.510	775	4.689	43.535
7	Bengkulu	11.749	1.805	463	176	1.360	15.553
8	Lampung	32.503	6.043	1.206	475	4.511	44.738
9	Kep Bangka Belitung	8.371	2.123	556	202	1.221	12.473
10	Kepulauan Riau	22.337	4.504	1.688	602	5.756	34.887
11	DKI Jakarta	217.104	55.900	19.460	8.307	55.257	356.028
12	Jawa Barat	213.377	64.018	14.790	6.260	38.848	337.293
13	Jawa Tengah	97.584	26.549	7.059	3.112	18.957	153.261
14	DI Yogyakarta	19.369	5.913	1.584	587	3.959	31.412
15	Jawa Timur	161.652	37.439	9.202	3.495	30.449	242.237
16	Banten	80.507	21.715	6.026	2.607	16.883	127.738
17	Bali	44.938	12.625	3.801	907	5.614	67.885
18	Nusa Tenggara Barat	20.051	4.458	955	235	2.284	27.983
19	Nusa Tenggara Timur	28.064	4.757	765	161	1.805	35.552
20	Kalimantan Barat	27.343	4.388	1.034	694	4.688	38.147
21	Kalimantan Tengah	16.357	2.451	644	520	2.377	22.349
22	Kalimantan Selatan	24.351	4.223	1.101	577	4.084	34.336
23	Kalimantan Timur	31.736	5.524	1.912	1.132	7.936	48.240
24	Kalimantan Utara	7.516	873	224	140	848	9.601
25	Sulawesi Utara	13.085	3.048	768	279	1.944	19.124
26	Sulawesi Tengah	17.543	2.550	579	225	2.034	22.931
27	Sulawesi Selatan	52.357	9.398	1.725	764	5.124	69.368
28	Sulawesi Tenggara	17.900	2.758	485	183	2.186	23.512
29	Gorontalo	5.023	967	256	69	768	7.083
30	Sulawesi Barat	7.763	1.156	143	54	521	9.637
31	Maluku	8.811	1.077	292	106	970	11.256
32	Maluku Utara	6.143	948	159	89	795	8.134

No.	Provinsi	Skala Perusahaan					Jumlah
		Mikro	Kecil	Menengah	Besar	Belum Teridentifikasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
33	Papua Barat	7.926	1.128	209	91	975	10.329
34	Papua	12.643	2.691	412	176	1.067	16.989
35	Tidak Teridentifikasi	4.503	789	205	30	85.605	91.132
<b>Jumlah</b>		<b>1.391.000</b>	<b>324.083</b>	<b>86.630</b>	<b>36.495</b>	<b>343.059</b>	<b>2.181.267</b>

Sumber: Kementerian Ketenagakerjaan, update sampai dengan tanggal 31 Desember 2023

Keterangan:

- Perusahaan yang dihitung merupakan Perusahaan terdaftar di WLKP
- Penentuan skala perusahaan berdasarkan jumlah tenaga kerja yang dilaporkan, dengan kriteria:

Skala Perusahaan	Kriteria
Mikro	Memiliki 1-4 Tenaga Kerja
Kecil	Memiliki 5-19 Tenaga Kerja
Menengah	Memiliki 20-99 Tenaga Kerja
Besar	Memiliki $\geq$ 100 Tenaga Kerja
Belum Teridentifikasi	Belum atau Tidak Melaporkan Informasi Tenaga Kerja

- Perhitungan jumlah Tenaga Kerja di perusahaan terdaftar WLKP menggunakan 2 metode perhitungan sebagai berikut:
  - o Apabila perusahaan sudah melaporkan data detil tenaga kerja di WLKP, maka jumlah TK dihitung berdasarkan jumlah TK yang sudah dilaporkan;
  - o Apabila perusahaan belum melaporkan data detil tenaga kerja di WLKP dan data perusahaan tersebut berasal dari OSS-BKPM, maka jumlah TK dihitung berdasarkan nilai agregasi TK & TKA yang terdapat pada aplikasi OSS-BKPM.
- Pengklasifikasian Wilayah di perusahaan terdaftar WLKP menggunakan 2 metode pengklasifikasian sebagai berikut:
  - o Apabila perusahaan sudah melaporkan data wilayah operasional di WLKP (kode pos, kelurahan, kecamatan, kab/kota, provinsi), maka pengklasifikasian wilayah berdasarkan informasi wilayah operasional yang sudah dilaporkan;
  - o Apabila perusahaan belum melaporkan data wilayah operasional di WLKP (kode pos, kelurahan, kecamatan, kab/kota, provinsi) dan data perusahaan tersebut berasal dari OSS-BKPM, maka pengklasifikasian wilayah berdasarkan informasi wilayah operasional yang terdapat pada aplikasi OSS-BKPM.
- Provinsi Tidak Teridentifikasi berarti perusahaan belum atau tidak melaporkan informasi wilayah

## 5.6 Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

**Tabel 5.6 Jumlah Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)  
menurut Spesialisasi  
s.d. Triwulan IV Tahun 2023**

No.	Spesialisasi	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	PAPA	120.869
2	PTP	6.857
3	PUBT	8.761
4	Pengelasan	2.410
5	Listrik	11.347
6	Elevator - Eskalator	1.954
7	Kebakaran	49.147
8	Konstruksi	8.807
9	Kesja	23.087
10	Ketinggian	36.556
11	LKBB	15.218
12	AK3U	46.166
13	SMK3	2.003
14	Penyelaman	240
<b>Jumlah</b>		<b>333.422</b>

*Sumber: Ditjen Binwasnaker & K3, Kemnaker RI*

### Keterangan:

- PAPA : Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut
- PTP : Pesawat Tenaga dan Produksi
- PUBT : Pesawat Uap dan Bejana Tekan
- Kesja : Kesehatan Kerja
- LKBB : Lingkungan Kerja Bahan Berbahaya
- AK3U : Ahli Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) Umum
- SMK3 : Sistem Manajemen dan Keselamatan & Kesehatan Kerja

## 5.7 Kegiatan Pemeriksaan Ketenagakerjaan

**Tabel 5.7 Jumlah Perusahaan yang Diperiksa menurut Provinsi dan Kegiatan Pemeriksaan s.d. Triwulan IV Tahun 2023**

No.	Provinsi	Kegiatan Pemeriksaan				Jumlah
		Pertama	Berkala	Ulang	Khusus	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	71	61	-	2	134
2	Sumatera Utara	443	245	252	73	1.013
3	Sumatera Barat	-	31	-	33	64
4	Riau	475	290	9	40	814
5	Jambi	80	80	41	-	201
6	Sumatera Selatan	21	22	3	1	47
7	Bengkulu	147	35	5	-	187
8	Lampung	40	6	-	-	46
9	Kep. Bangka Belitung	114	98	-	12	224
10	Kep. Riau	1.305	816	-	-	2.121
11	DKI Jakarta	129	24	18	84	255
12	Jawa Barat	737	1.927	-	398	3.062
13	Jawa Tengah	421	677	13	17	1.128
14	DI Yogyakarta	64	204	-	47	315
15	Jawa Timur	491	728	-	11	1.230
16	Banten	259	462	-	25	746
17	Bali	1.155	423	-	-	1.578
18	Nusa Tenggara Barat	190	-	-	-	190
19	Nusa Tenggara Timur	-	590	-	-	590
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	191	-	-	6	197
22	Kalimantan Selatan	44	122	-	17	183
23	Kalimantan Timur	-	-	-	10	10
24	Kalimantan Utara	186	-	-	-	186
25	Sulawesi Utara	159	287	-	14	460
26	Sulawesi Tengah	-	75	-	-	75
27	Sulawesi Selatan	397	349	4	31	781
28	Sulawesi Tenggara	-	68	68	-	136
29	Gorontalo	5	21	-	-	26
30	Sulawesi Barat	34	50	-	-	84
31	Maluku	110	210	-	-	320
32	Maluku Utara	19	15	-	-	34
33	Papua Barat	908	160	-	-	1.068
34	Papua	10	10	-	-	20
<b>Jumlah</b>		<b>8.205</b>	<b>8.086</b>	<b>413</b>	<b>821</b>	<b>17.525</b>

Sumber: Ditjen Binwasnaker & K3, Kemnaker RI

Keterangan:

Jumlah berdasarkan data administratif yang dilaporkan di instansi ketenagakerjaan sesuai Permenakertrans Nomor 09/2005 Tabel K5

## 5.8 Nota Pemeriksaan Perusahaan

**Tabel 5.8 Jumlah Nota Pemeriksaan  
menurut Provinsi dan Kegiatan Pembinaan  
s.d Triwulan IV 2023**

No.	Provinsi	Kegiatan Pembinaan (kali)			Jumlah
		NP. I	NP. II	NP. III	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	118	-	-	118
2	Sumatera Utara	110	5	-	115
3	Sumatera Barat	13	-	-	13
4	Riau	180	-	-	180
5	Jambi	92	-	-	92
6	Sumatera Selatan	10	4	-	14
7	Bengkulu	155	12	-	167
8	Lampung	51	-	-	51
9	Kep. Bangka Belitung	41	4	-	45
10	Kep. Riau	10	-	-	10
11	DKI Jakarta	208	15	-	223
12	Jawa Barat	151	2	-	153
13	Jawa Tengah	1.011	7	-	1.018
14	DI Yogyakarta	93	12	-	105
15	Jawa Timur	1.188	-	-	1.188
16	Banten	79	6	-	85
17	Bali	1.578	-	-	1.578
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	306	-	-	306
20	Kalimantan Barat	95	-	-	95
21	Kalimantan Tengah	191	-	-	191
22	Kalimantan Selatan	3	-	-	3
23	Kalimantan Timur	38	38	-	76
24	Kalimantan Utara	180	6	-	186
25	Sulawesi Utara	387	-	-	387
26	Sulawesi Tengah	-	-	-	-
27	Sulawesi Selatan	201	21	-	222
28	Sulawesi Tenggara	68	-	-	68
29	Gorontalo	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	82	4	-	86
31	Maluku	130	-	-	130
32	Maluku Utara	-	-	-	-
33	Papua Barat	1.068	-	-	1.068
34	Papua	5	-	-	5
<b>Jumlah</b>		<b>7.842</b>	<b>136</b>	<b>-</b>	<b>7.978</b>

Sumber: Ditjen Binwasnaker & K3, Kemnaker RI

Keterangan:

- Jumlah berdasarkan data administratif yang dilaporkan di instansi ketenagakerjaan sesuai Permenakertrans Nomor 09/2005 Tabel K5
- NP: Nota Pemeriksaan

## 5.9 Perusahaan yang Melanggar Norma Ketenagakerjaan

**Tabel 5.9 Jumlah Perusahaan yang Melanggar Norma Ketenagakerjaan menurut Provinsi s.d Triwulan IV Tahun 2023**

No.	Provinsi	Perusahaan Melanggar
(1)	(2)	(3)
1	Aceh	134
2	Sumatera Utara	154
3	Sumatera Barat	13
4	Riau	192
5	Jambi	82
6	Sumatera Selatan	399
7	Bengkulu	112
8	Lampung	31
9	Kep. Bangka Belitung	188
10	Kep. Riau	213
11	DKI Jakarta	279
12	Jawa Barat	823
13	Jawa Tengah	917
14	DI Yogyakarta	70
15	Jawa Timur	885
16	Banten	313
17	Bali	95
18	Nusa Tenggara Barat	16
19	Nusa Tenggara Timur	-
20	Kalimantan Barat	
21	Kalimantan Tengah	178
22	Kalimantan Selatan	79
23	Kalimantan Timur	-
24	Kalimantan Utara	62
25	Sulawesi Utara	88
26	Sulawesi Tengah	-
27	Sulawesi Selatan	201
28	Sulawesi Tenggara	-
29	Gorontalo	-
30	Sulawesi Barat	53
31	Maluku	130
32	Maluku Utara	3
33	Papua Barat	513
34	Papua	-
35	Ditjen. Binwasnaker	-
	<b>Jumlah</b>	<b>6.223</b>

Sumber: Ditjen Binwasnaker & K3, Kemnaker RI

Keterangan:

Jumlah berdasarkan data administratif yang dilaporkan di instansi ketenagakerjaan sesuai Permenakertrans Nomor 09/2005 Tabel K9A

## 5.10 Perusahaan Pelanggar Tindak Pidana Ketenagakerjaan yang Disidik

Tabel 5.10. Jumlah Putusan Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan menurut Provinsi dan Jenis Pelanggaran s.d. Triwulan IV Tahun 2023

No.	Provinsi	Jenis Pelanggaran													Jumlah		
		Tipiring					Biasa										
		WLKP (3)	PP (4)	K3 (5)	UU 3/1951 (6)	Serikat Pekerja (7)	Pengupahan (8)	Upah (9)	Pesangan (10)	PMI (11)	BPJS (12)	(13)					
1	Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
4	Riau	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
5	Jambi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Sumatera Selatan	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Lampung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Kep. Babel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	1	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5
13	Jawa Tengah	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
14	DI. Yogyakarta	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
15	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Banten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	Provinsi	Jenis Pelanggaran												Jumlah	
		Tipiring						Biasa							
		WLKP (3)	PP (4)	K3 (5)	UU 3/1951 (6)	Serikat Pekerja (7)	Pengupahan (8)	Upah (9)	Pesangon (10)	PMI (11)	BPJS (12)				
(1)	(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(13)
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Selatan	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
28	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Ditjen. Binwasnaker	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20</b>

Sumber: Ditjen Binwasnaker & K3, Kemnaker RI

Keterangan:

Tipiring : Proses Penyidikan Cepat melalui Proses Tindak Pidana Ringan (Tipiring)

Biasa : Proses Penyidikan Biasa

WLKP : Pelanggaran Norma Wajib Laporan Ketenagakerjaan Perusahaan

PP : Pelanggaran Norma Peraturan Perusahaan

K3 : Pelanggaran Norma K3

UU 3/1951 : Pelanggaran atas Undang-Undang Pengawasan Ketenagakerjaan

Pengupahan : Pelanggaran Norma Pengupahan

BPJS KK : Pelanggaran Norma JAMSOSTEK

Hubker : Pelanggaran Norma Hubungan Kerja

PMI : Pekerja Migran Indonesia



## 5.11 Jumlah Pengawas Ketenagakerjaan

Tabel 5.11. Jumlah Pengawas Ketenagakerjaan menurut Provinsi/ Unit Kerja dan Jenjang Jabatan s.d Semester II Tahun 2023

No.	Provinsi	Jenjang Jabatan				Jumlah
		Ahli Pertama	Ahli Muda	Ahli Madya	Ahli Utama	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	5	20	2	-	27
2	Sumatera Utara	2	26	17	-	45
3	Sumatera Barat	2	18	12	-	32
4	Riau	2	17	13	1	33
5	Jambi	2	22	9	-	33
6	Sumatera Selatan	10	21	8	-	39
7	Bengkulu	1	11	7	-	19
8	Lampung	1	24	12	-	37
9	Kep. Bangka Belitung	2	22	3	-	27
10	Kep. Riau	4	30	3	-	37
11	DKI Jakarta	6	23	18	-	47
12	Jawa Barat	36	78	46	-	160
13	Jawa Tengah	18	74	48	-	140
14	DI Yogyakarta	3	8	10	-	21
15	Jawa Timur	27	94	40	-	161
16	Banten	13	29	24	-	66
17	Bali	2	12	8	-	22
18	Nusa Tenggara Barat	1	14	2	-	17
19	Nusa Tenggara Timur	5	12	-	-	17
20	Kalimantan Barat	13	13	4	-	30
21	Kalimantan Tengah	2	20	4	-	26
22	Kalimantan Selatan	15	19	2	-	36
23	Kalimantan Timur	6	36	7	-	49
24	Kalimantan Utara	2	1	1	-	4
25	Sulawesi Utara	-	16	14	1	31
26	Sulawesi Tengah	2	14	5	-	21
27	Sulawesi Selatan	1	26	24	-	51
28	Sulawesi Tenggara	-	16	3	-	19
29	Gorontalo	4	6	2	-	12
30	Sulawesi Barat	4	7	-	-	11
31	Maluku	12	8	1	-	21
32	Maluku Utara	-	6	-	-	6
33	Papua Barat	1	10	3	-	14
34	Papua	10	12	1	-	23
35	Ditjen. Binwasnaker	28	77	28	-	133
<b>Jumlah</b>		<b>242</b>	<b>842</b>	<b>381</b>	<b>2</b>	<b>1.467</b>

Sumber: Ditjen Binwasnaker & K3, Kemnaker RI

## 5.12 Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Tabel 5.12.1 Jumlah Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) menurut Provinsi/ Unit Kerja, dan Jenis Kelamin s.d. Semester II Tahun 2023

No.	Provinsi	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	-	-	-
2	Sumatera Utara	-	-	-
3	Sumatera Barat	7	7	14
4	Riau	-	-	-
5	Jambi	-	-	-
6	Sumatera Selatan	2	-	2
7	Bengkulu	-	-	-
8	Lampung	2	1	3
9	Kep. Bangka Belitung	1	1	2
10	Kep. Riau	-	-	-
11	DKI Jakarta	9	11	20
12	Jawa Barat	7	16	23
13	Jawa Tengah	10	6	16
14	DI Yogyakarta	4	4	8
15	Jawa Timur	7	12	19
16	Banten	-	-	-
17	Bali	1	-	1
18	Nusa Tenggara Barat	1	1	2
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-
20	Kalimantan Barat	1	3	4
21	Kalimantan Tengah	-	-	-
22	Kalimantan Selatan	-	-	-
23	Kalimantan Timur	5	4	9
24	Kalimantan Utara	-	-	-
25	Sulawesi Utara	-	1	1
26	Sulawesi Tengah	-	-	-
27	Sulawesi Selatan	9	14	23
28	Sulawesi Tenggara	-	-	-
29	Gorontalo	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-
31	Maluku	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-
33	Papua Barat	-	-	-
34	Papua	-	-	-
35	Ditjen. Binwasnaker & K3	8	19	27
<b>Jumlah</b>		<b>74</b>	<b>100</b>	<b>174</b>

Sumber: Ditjen Binwasnaker & K3, Kemnaker RI

**Tabel 5.12.2 Jumlah Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)  
menurut Provinsi/ Unit Kerja, dan Jenjang Jabatan  
s.d. Semester II Tahun 2023**

No.	Provinsi	Jenjang Jabatan Fungsional Penguji K3			Jumlah
		Ahli Madya	Ahli Muda	Ahli Pertama	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	-	7	7	14
4	Riau	-	-	-	-
5	Jambi	-	-	-	-
6	Sumatera Selatan	1	1		2
7	Bengkulu	-	-	-	-
8	Lampung	3	-	-	3
9	Kep. Bangka Belitung	-	-	2	2
10	Kep. Riau	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	5	9	6	20
12	Jawa Barat	5	7	11	23
13	Jawa Tengah	9	6	1	16
14	DI Yogyakarta	2	4	2	8
15	Jawa Timur	4	3	12	19
16	Banten	-	-	-	-
17	Bali	1	-	-	1
18	Nusa Tenggara Barat	-	1	1	2
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	1	2	1	4
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-
22	Kalimantan Selatan	-	-	-	-
23	Kalimantan Timur	2	2	5	9
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara		1		1
26	Sulawesi Tengah	-	-	-	-
27	Sulawesi Selatan	5	11	7	23
28	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-
29	Gorontalo	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-
33	Papua Barat	-	-	-	-
34	Papua	-	-	-	-
35	Ditjen. Binwasnaker & K3	6	11	10	27
<b>Jumlah</b>		<b>44</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>174</b>

Sumber: Ditjen Binwasnaker & K3, Kemnaker RI

### 5.13 Kecelakaan Kerja

**Tabel 5.13.1 Jumlah Kasus Kecelakaan Kerja di Indonesia  
menurut Provinsi  
s.d. Semester II Tahun 2023**

No.	Provinsi	Kasus		
		PU	BPU	Jakon
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	751	139	6
2	Sumatera Utara	21.302	716	156
3	Sumatera Barat	5.424	547	82
4	Riau	28.329	610	180
5	Jambi	3.388	212	16
6	Sumatera Selatan	6.665	290	7
7	Bengkulu	942	59	5
8	Lampung	3.142	160	5
9	Kep. Bangka Belitung	1.365	74	10
10	Kepulauan Riau	19.664	666	187
11	DKI Jakarta	21.034	1.980	385
12	Jawa Barat	62.808	2.824	397
13	Jawa Tengah	40.589	2.399	223
14	DI Yogyakarta	6.470	714	36
15	Jawa Timur	53.319	2.810	474
16	Banten	28.989	1.135	369
17	Bali	7.225	2.225	62
18	Nusa Tenggara Barat	394	199	15
19	Nusa Tenggara Timur	172	41	25
20	Kalimantan Barat	3.496	448	29
21	Kalimantan Tengah	8.859	149	13
22	Kalimantan Selatan	4.447	319	31
23	Kalimantan Timur	9.434	361	72
24	Kalimantan Utara	613	124	10
25	Sulawesi Utara	696	64	18
26	Sulawesi Tengah	233	86	1
27	Sulawesi Selatan	1.890	298	81
28	Sulawesi Tenggara	534	30	7
29	Gorontalo	3.416	76	25
30	Sulawesi Barat	57	24	4
31	Maluku	183	23	3
32	Maluku Utara	578	28	9
33	Papua Barat	477	31	7
34	Papua	970	60	21
<b>Jumlah</b>		<b>347.855</b>	<b>19.921</b>	<b>2.971</b>

Sumber: BPJS-TK

Keterangan:

- Jumlah kasus kecelakaan kerja diambil dari program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
  - PU : Pekerja Penerima Upah
  - BPU : Pekerja Bukan Penerima Upah
  - Jakon : Pekerja Jasa Konstruksi

**Tabel 5.13.2 Jumlah Klaim Kecelakaan Kerja di Indonesia  
menurut Provinsi  
s.d. Semester II Tahun 2023**

No.	Provinsi	Klaim		
		PU	BPU	Jakon
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	10.957.984.180	965.543.950	265.999.320
2	Sumatera Utara	118.047.562.780	5.272.848.510	3.444.020.620
3	Sumatera Barat	25.235.237.890	2.342.931.700	1.367.451.320
4	Riau	181.281.614.410	6.534.327.750	5.674.698.730
5	Jambi	19.730.920.050	1.869.576.180	299.822.410
6	Sumatera Selatan	56.823.581.710	2.458.779.060	401.971.040
7	Bengkulu	4.818.179.250	462.121.170	86.430.640
8	Lampung	27.813.257.280	1.240.337.080	190.847.760
9	Kep. Bangka Belitung	11.275.628.820	518.790.080	536.029.230
10	Kepulauan Riau	117.065.378.227	4.478.964.000	2.436.853.220
11	DKI Jakarta	384.458.028.960	29.736.379.920	11.044.407.720
12	Jawa Barat	567.755.777.440	29.660.330.270	7.393.899.540
13	Jawa Tengah	171.289.457.585	16.462.070.060	2.271.373.230
14	DI Yogyakarta	26.927.986.970	3.132.079.890	815.131.100
15	Jawa Timur	403.161.046.637	23.638.905.780	7.413.098.210
16	Banten	278.215.220.000	13.240.695.180	3.904.049.270
17	Bali	58.161.354.130	15.906.617.080	1.699.882.380
18	Nusa Tenggara Barat	8.846.697.690	1.495.872.430	728.913.180
19	Nusa Tenggara Timur	3.983.092.950	619.931.240	547.340.400
20	Kalimantan Barat	31.968.524.870	3.033.060.900	692.837.320
21	Kalimantan Tengah	67.828.678.650	810.074.140	734.552.150
22	Kalimantan Selatan	42.468.600.760	1.833.597.250	417.687.920
23	Kalimantan Timur	60.575.075.470	1.869.659.520	1.024.796.620
24	Kalimantan Utara	8.665.115.110	1.287.419.550	259.160.290
25	Sulawesi Utara	11.310.553.310	1.157.027.720	848.915.910
26	Sulawesi Tengah	2.281.077.350	957.962.070	9.039.400
27	Sulawesi Selatan	25.367.622.900	3.524.875.450	2.239.526.100
28	Sulawesi Tenggara	11.613.679.410	277.752.390	226.247.910
29	Gorontalo	20.706.463.230	773.706.480	385.050.810
30	Sulawesi Barat	1.555.655.250	122.746.940	363.000.000
31	Maluku	6.053.412.480	210.252.120	4.577.060
32	Maluku Utara	5.967.463.200	42.768.660	227.694.980
33	Papua Barat	5.433.006.510	352.973.580	765.389.770
34	Papua	10.810.428.830	1.032.737.360	1.263.287.180
<b>Jumlah</b>		<b>2.788.453.364.289</b>	<b>177.323.715.460</b>	<b>59.983.982.740</b>

Sumber: BPJS-TK

Keterangan:

Jumlah kasus kecelakaan kerja diambil dari program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Tabel 5.14 Jumlah Perusahaan Terdaftar WLKP Menurut Provinsi dan Skala Perusahaan Berdasarkan Jumlah Tenaga Kerja, sampai dengan 31 Desember 2023

Provinsi	Mikro	Kecil	Menengah	Besar	Tidak Teridentifikasi	Grand Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	21.654	3.431	747	241	4.128	30.201
Bali	44.938	12.625	3.801	907	5.614	67.885
Banten	80.507	21.715	6.026	2.607	16.883	127.738
Bengkulu	11.749	1.805	463	176	1.360	15.553
Daerah Istimewa Yogyakarta	19.369	5.913	1.584	587	3.959	31.412
Dki Jakarta	217.104	55.900	19.460	8.307	55.257	356.028
Gorontalo	5.023	967	256	69	768	7.083
Jambi	16.692	2.698	917	400	3.244	23.951
Jawa Barat	213.377	64.018	14.790	6.260	38.848	337.293
Jawa Tengah	97.584	26.549	7.059	3.112	18.957	153.261
Jawa Timur	161.652	37.439	9.202	3.495	30.449	242.237
Kalimantan Barat	27.343	4.388	1.034	694	4.688	38.147
Kalimantan Selatan	24.351	4.223	1.101	577	4.084	34.336
Kalimantan Tengah	16.357	2.451	644	520	2.377	22.349
Kalimantan Timur	31.736	5.524	1.912	1.132	7.936	48.240
Kalimantan Utara	7.516	873	224	140	848	9.601
Kepulauan Bangka Belitung	8.371	2.123	556	202	1.221	12.473
Kepulauan Riau	22.337	4.504	1.688	602	5.756	34.887
Lampung	32.503	6.043	1.206	475	4.511	44.738
Maluku	8.811	1.077	292	106	970	11.256
Maluku Utara	6.143	948	159	89	795	8.134
Nusa Tenggara Barat	20.051	4.458	955	235	2.284	27.983
Nusa Tenggara Timur	28.064	4.757	765	161	1.805	35.552
Papua	12.643	2.691	412	176	1.067	16.989
Papua Barat	7.926	1.128	209	91	975	10.329
Riau	32.661	5.413	1.771	1.058	6.820	47.723
Sulawesi Barat	7.763	1.156	143	54	521	9.637
Sulawesi Selatan	52.357	9.398	1.725	764	5.124	69.368
Sulawesi Tengah	17.543	2.550	579	225	2.034	22.931
Sulawesi Tenggara	17.900	2.758	485	183	2.186	23.512
Sulawesi Utara	13.085	3.048	768	279	1.944	19.124
Sumatera Barat	24.749	4.392	1.077	354	3.738	34.310
Sumatera Selatan	30.258	6.303	1.510	775	4.689	43.535
Sumatera Utara	46.380	10.028	2.905	1.412	11.614	72.339
Tidak Teridentifikasi	4.503	789	205	30	85.605	91.132
<b>Total</b>	<b>1.391.000</b>	<b>324.083</b>	<b>86.630</b>	<b>36.495</b>	<b>343.059</b>	<b>2.181.267</b>

Sumber: Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP), update 31 Desember 2023

# **Bab VI**

## **Ketenagakerjaan Umum**





**Tabel 6.1**  
**Penduduk Usia Kerja (15 Tahun ke Atas) di Indonesia**  
**Menurut Provinsi dan Jenis Kegiatan Utama**  
**Agustus 2023**

Provinsi	JenisKegiatan							Total Penduduk Usia Kerja
	Angkatan Kerja			Bukan Angkatan Kerja				
	Bekerja	Pengangguran	Jumlah	Sekolah	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	Jumlah	
Aceh	2.447.345	157.107	2.604.452	348.154	810.029	258.433	1.416.616	4.021.068
SumateraUtara	7.549.537	472.085	8.021.622	846.779	1.973.883	446.326	3.266.988	11.288.610
SumateraBarat	2.844.925	179.505	3.024.430	361.079	750.265	209.213	1.320.557	4.344.987
Riau	3.002.334	132.454	3.134.788	406.418	1.149.148	173.385	1.728.951	4.863.739
Jambi	1.802.264	85.576	1.887.840	214.360	542.982	100.652	857.994	2.745.834
SumateraSelatan	4.399.659	188.511	4.588.170	453.774	1.163.796	282.021	1.899.591	6.487.761
Bengkulu	1.069.615	37.845	1.107.460	127.006	272.211	55.058	454.275	1.561.735
Lampung	4.697.658	207.242	4.904.900	490.554	1.407.723	200.115	2.098.392	7.003.292
Bangka-Belitung	749.815	35.812	785.627	84.668	245.812	33.467	363.947	1.149.574
KepulauanRiau	1.019.356	74.330	1.093.686	129.088	315.145	54.543	498.776	1.592.462
DKIJakarta	5.072.737	354.496	5.427.233	807.002	1.696.191	392.487	2.895.680	8.322.913
JawaBarat	23.503.598	1.888.287	25.391.885	2.884.118	8.350.379	1.560.324	12.794.821	38.186.706
JawaTengah	19.988.875	1.080.260	21.069.135	1.933.643	5.088.278	1.286.573	8.308.494	29.377.629
DIYogyakarta	2.139.710	81.984	2.221.694	230.462	428.418	118.354	777.234	2.998.928
JawaTimur	22.703.177	1.165.587	23.868.764	2.256.640	5.564.856	1.204.915	9.026.411	32.895.175
Banten	5.516.656	448.432	5.965.088	697.135	2.084.111	510.028	3.291.274	9.256.362
Bali	2.617.816	72.421	2.690.237	253.989	439.153	106.826	799.968	3.490.205
NusaTenggaraBarat	2.892.982	83.243	2.976.225	279.787	647.008	156.584	1.083.379	4.059.604
NusaTenggaraTimur	2.896.901	93.815	2.990.716	325.395	467.500	166.207	959.102	3.949.818
KalimantanBarat	2.775.245	147.574	2.922.819	341.394	782.139	163.741	1.287.274	4.210.093
KalimantanTengah	1.349.875	57.762	1.407.637	160.642	457.593	69.486	687.721	2.095.358
KalimantanSelatan	2.079.681	93.576	2.173.257	218.371	612.549	111.332	942.252	3.115.509
KalimantanTimur	1.847.295	103.565	1.950.860	265.822	641.208	117.247	1.024.277	2.975.137
KalimantanUtara	372.270	15.553	387.823	50.023	94.426	19.000	163.449	551.272
SulawesiUtara	1.250.948	81.201	1.332.149	148.946	470.250	127.128	746.324	2.078.473
SulawesiTengah	1.547.169	47.076	1.594.245	172.826	426.518	88.702	688.046	2.282.291
SulawesiSelatan	4.490.983	203.500	4.694.483	563.507	1.542.131	349.079	2.454.717	7.149.200
SulawesiTenggara	1.351.640	43.894	1.395.534	160.786	369.753	65.501	596.040	1.991.574
Gorontalo	631.521	19.904	651.425	62.447	169.968	36.433	268.848	920.273
SulawesiBarat	743.007	17.273	760.280	80.949	192.567	36.302	309.818	1.070.098
Maluku	853.254	57.504	910.758	119.050	284.758	117.497	521.305	1.432.063
MalukuUtara	634.699	28.600	663.299	80.624	184.201	50.680	315.505	978.804
PapuaBarat	560.883	31.919	592.802	84.399	161.101	43.361	288.861	881.663
Papua	2.448.947	67.182	2.516.129	156.725	441.573	144.804	743.102	3.259.231
<b>Total</b>	<b>139.852.377</b>	<b>7.855.075</b>	<b>147.707.452</b>	<b>15.796.562</b>	<b>40.227.623</b>	<b>8.855.804</b>	<b>64.879.989</b>	<b>212.587.441</b>

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2023, diolah Pusdatik Naker

Tabel 6.2  
Penduduk Usia Kerja (15 Tahun ke Atas) di Indonesia  
Menurut Provinsi dan Kepesertaan Pada Pelatihan/Kursus  
Agustus 2023

Provinsi	Pernah ikut pelatihan atau kursus dan mendapatkan sertifikat			Total
	pernah dan mendapatkan sertifikat	pernah tetapi tidak mendapatkan sertifikat	tidak pernah	
Aceh	480.767	159.041	3.381.260	4.021.068
Sumatera Utara	1.490.441	432.500	9.365.669	11.288.610
Sumatera Barat	803.585	218.697	3.322.705	4.344.987
Riau	719.041	149.742	3.994.956	4.863.739
Jambi	379.067	96.564	2.270.203	2.745.834
Sumatera Selatan	833.649	236.296	5.417.816	6.487.761
Bengkulu	258.720	54.171	1.248.844	1.561.735
Lampung	776.334	237.880	5.989.078	7.003.292
Bangka-Belitung	213.451	36.529	899.594	1.149.574
Kepulauan Riau	335.392	62.499	1.194.571	1.592.462
DKI Jakarta	1.814.568	308.370	6.199.975	8.322.913
Jawa Barat	4.744.633	1.372.599	32.069.474	38.186.706
Jawa Tengah	3.977.311	1.632.285	23.768.033	29.377.629
D I Yogyakarta	782.936	189.633	2.026.359	2.998.928
Jawa Timur	3.937.781	1.223.702	27.733.692	32.895.175
Banten	1.041.479	254.671	7.960.212	9.256.362
Bali	808.935	142.827	2.538.443	3.490.205
Nusa Tenggara Barat	667.825	254.773	3.137.006	4.059.604
Nusa Tenggara Timur	500.965	144.954	3.303.899	3.949.818
Kalimantan Barat	462.172	137.221	3.610.700	4.210.093
Kalimantan Tengah	278.551	53.933	1.762.874	2.095.358
Kalimantan Selatan	631.001	107.244	2.377.264	3.115.509
Kalimantan Timur	656.396	97.745	2.220.996	2.975.137
Kalimantan Utara	99.259	19.319	432.694	551.272
Sulawesi Utara	379.313	84.624	1.614.536	2.078.473
Sulawesi Tengah	261.646	82.995	1.937.650	2.282.291
Sulawesi Selatan	1.061.282	243.218	5.844.700	7.149.200
Sulawesi Tenggara	364.366	60.636	1.566.572	1.991.574
Gorontalo	153.881	39.971	726.421	920.273
Sulawesi Barat	201.783	41.822	826.493	1.070.098
Maluku	230.912	43.056	1.158.095	1.432.063
Maluku Utara	98.964	23.496	856.344	978.804
Papua Barat	155.139	33.414	693.110	881.663
Papua	239.694	33.295	2.986.242	3.259.231
<b>Total</b>	<b>29.841.239</b>	<b>8.309.722</b>	<b>174.436.480</b>	<b>212.587.441</b>

*Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2023, diolah Pusdatik Naker*

Tabel 6.3  
Penduduk Usia Kerja (15 Tahun ke Atas) di Indonesia  
Menurut Jenis Kegiatan Utama dan Jenis Kelamin  
Agustus 2023

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
Bekerja	85.236.573	54.615.804	139.852.377
Pengangguran	4.888.264	2.966.811	7.855.075
Sekolah	7.619.258	8.177.304	15.796.562
Mengurus Rumah Tangga	3.468.519	36.759.104	40.227.623
Lainnya	5.750.391	3.105.413	8.855.804
<b>Total</b>	<b>106.963.005</b>	<b>105.624.436</b>	<b>212.587.441</b>

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2023, diolah Pusdatik Naker

Tabel 6.4  
Penduduk Usia Kerja (15 Tahun ke Atas) di Indonesia  
Menurut Jenis Kegiatan Utama dan Daerah Tempat Tinggal  
Agustus 2023

Kegiatan Utama	Klasifikasi Perkotaan/Perdesaan		Total
	Perkotaan	Perdesaan	
Bekerja	78.888.062	60.964.315	139.852.377
Pengangguran	5.396.720	2.458.355	7.855.075
Sekolah	10.044.265	5.752.297	15.796.562
Mengurus Rumah Tangga	24.732.402	15.495.221	40.227.623
Lainnya	5.385.350	3.470.454	8.855.804
<b>Total</b>	<b>124.446.799</b>	<b>88.140.642</b>	<b>212.587.441</b>

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2023, diolah Pusdatik Naker

Tabel 6.5  
Penduduk Usia Kerja (15 Tahun ke Atas) di Indonesia  
Menurut Jenis Kegiatan Utama dan Pendidikan  
Agustus 2023

Kegiatan Utama	Pendidikan tertinggi yang ditamatkan						Total
	<=SD	SMP	SMU	SMK	Diploma I / II / III	D IV/S1/S2/S3	
Bekerja	51.494.637	24.844.729	28.326.603	17.334.263	3.413.882	14.438.263	139.852.377
Pengangguran	1.353.697	1.246.932	2.514.481	1.780.095	171.897	787.973	7.855.075
Sekolah	1.804.734	10.360.969	2.827.574	687.666	22.471	93.148	15.796.562
Mengurus Rumah Tangga	16.915.158	7.943.460	8.556.567	3.735.606	903.988	2.172.844	40.227.623
Lainnya	4.697.800	1.125.298	1.581.036	764.729	135.269	551.672	8.855.804
<b>Total</b>	<b>76.266.026</b>	<b>45.521.388</b>	<b>43.806.261</b>	<b>24.302.359</b>	<b>4.647.507</b>	<b>18.043.900</b>	<b>212.587.441</b>

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2023, diolah Pusdatik Naker

Tabel 6.6  
Penduduk Usia Kerja (15 Tahun ke Atas) di Indonesia  
Menurut Jenis Kegiatan Utama dan Kepesertaan Pada Pelatihan/Kursus  
Agustus 2023

Kegiatan Utama	Pernah ikut pelatihan atau kursus dan mendapatkan sertifikat			Total
	pernah dan mendapatkan sertifikat	pernah tetapi tidak mendapatkan sertifikat	tidak pernah	
Bekerja	22.744.101	6.023.775	111.084.501	139.852.377
Pengangguran	1.284.196	371.208	6.199.671	7.855.075
Sekolah	1.020.392	352.619	14.423.551	15.796.562
Mengurus Rumah Tangga	3.891.781	1.369.360	34.966.482	40.227.623
Lainnya	900.769	192.760	7.762.275	8.855.804
<b>Total</b>	<b>29.841.239</b>	<b>8.309.722</b>	<b>174.436.480</b>	<b>212.587.441</b>

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2023, diolah Pusdatik Naker

Tabel 6.7  
Penduduk Usia Kerja (15 Tahun ke Atas) di Indonesia  
Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kegiatan Utama  
Agustus 2023

Kelompok Umur	Jenis Kegiatan							Total Penduduk Usia Kerja
	Angkatan Kerja			Bukan Angkatan Kerja				
	Bekerja	Pengangguran	Jumlah	Sekolah	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	Jumlah	
15-19 tahun	4.704.951	1.633.463	6.338.414	13.351.648	1.447.699	993.066	15.792.413	22.130.827
20-24 tahun	13.175.089	2.670.475	15.845.564	2.277.075	3.255.615	959.133	6.491.823	22.337.387
25-29 tahun	15.996.632	1.292.355	17.288.987	135.493	4.605.697	475.899	5.217.089	22.506.076
30-34 tahun	16.555.574	609.968	17.165.542	14.349	4.644.405	274.949	4.933.703	22.099.245
35-39 tahun	16.602.867	433.484	17.036.351	5.493	4.200.539	189.353	4.395.385	21.431.736
40-44 tahun	16.292.858	301.667	16.594.525	5.748	3.652.632	176.745	3.835.125	20.429.650
45-49 tahun	15.368.956	281.342	15.650.298	2.926	3.246.114	214.978	3.464.018	19.114.316
50-54 tahun	13.393.721	244.284	13.638.005	863	2.990.832	299.357	3.291.052	16.929.057
55-59 tahun	10.946.491	169.268	11.115.759	828	2.798.840	513.743	3.313.411	14.429.170
60-64 tahun	7.563.794	83.015	7.646.809	2.139	3.053.748	891.082	3.946.969	11.593.778
65 tahun +	9.251.444	135.754	9.387.198	-	6.331.502	3.867.499	10.199.001	19.586.199
<b>Total</b>	<b>139.852.377</b>	<b>7.855.075</b>	<b>147.707.452</b>	<b>15.796.562</b>	<b>40.227.623</b>	<b>8.855.804</b>	<b>64.879.989</b>	<b>212.587.441</b>

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2023, diolah Pusdatik Naker

Tabel 6.8  
Penduduk Yang Bekerja di Indonesia  
Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin  
Agustus 2023

Status Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
Berusaha sendiri	19.413.530	12.801.082	32.214.612
Berusaha dibantu pekerja tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar	13.601.802	6.185.487	19.787.289
Berusaha dibantu pekerja tetap dan dibayar	3.513.136	977.242	4.490.378
Buruh/karyawan/pegawai	34.149.542	18.545.595	52.695.137
Pekerja bebas di pertanian	3.555.538	1.654.103	5.209.641
Pekerja bebas di nonpertanian	6.154.032	1.212.921	7.366.953
Pekerja keluarga/tidak dibayar	4.848.993	13.239.374	18.088.367
<b>Total</b>	<b>85.236.573</b>	<b>54.615.804</b>	<b>139.852.377</b>

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2023, diolah Pusdatik Naker

Tabel 6.9  
Penduduk Yang Bekerja di Indonesia  
Menurut Jenis Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin  
Agustus 2023

Jenis Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia	536.105	31.624	567.729
Manajer	2.187.959	1.178.924	3.366.883
Profesional	3.356.043	5.264.534	8.620.577
Teknisi dan Asisten Profesional	2.968.588	1.320.732	4.289.320
Tenaga Tata Usaha	3.185.996	2.645.106	5.831.102
Tenaga Usaha Jasa dan Tenaga Penjualan	16.222.502	18.937.834	35.160.336
Pekerja Terampil Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	19.539.548	10.088.344	29.627.892
Pekerja Pengolahan, Kerajinan, dan YBDI	10.840.837	5.611.539	16.452.376
Operator dan Perakit Mesin	8.121.846	1.207.849	9.329.695
Pekerja Kasar	18.277.149	8.329.318	26.606.467
<b>Total</b>	<b>85.236.573</b>	<b>54.615.804</b>	<b>139.852.377</b>

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2023, diolah Pusdatik Naker

**Tabel 6.10**  
**Penduduk Yang Bekerja di Indonesia**  
**Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin**  
**Agustus 2023**

Lapangan Usaha	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
Pertanian, Kehutanan & Perikanan	25.741.721	13.709.517	39.451.238
Pertambangan & Penggalian	1.530.157	132.331	1.662.488
Industri Pengolahan	10.889.057	8.454.275	19.343.332
Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas & Udara Dingin	273.482	49.147	322.629
Treatment Air, Treatment Air Limbah, Treatment & Pemulihan	371.108	121.968	493.076
Konstruksi	9.088.526	163.295	9.251.821
Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi & Perawatan Mobil & Sepeda Motor	13.578.553	12.974.105	26.552.658
Pengangkutan & Pergudangan	5.832.662	314.815	6.147.477
Penyediaan Akomodasi & Penyediaan Makan Minum	4.406.640	6.378.615	10.785.255
Informasi & Komunikasi	653.365	336.507	989.872
Aktivitas Keuangan & Asuransi	1.059.182	577.985	1.637.167
Real Estat	328.107	153.645	481.752
Jasa Profesional & Perusahaan	1.747.696	583.738	2.331.434
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	3.375.135	1.505.196	4.880.331
Pendidikan	2.523.480	4.397.729	6.921.209
Aktivitas Kesehatan Manusia & Aktivitas Sosial	740.506	1.470.216	2.210.722
Jasa Lainnya	3.097.196	3.292.720	6.389.916
<b>Total</b>	<b>85.236.573</b>	<b>54.615.804</b>	<b>139.852.377</b>

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2023, diolah Pusdatik Naker

**Tabel 6.1.11**  
**Pengangguran Terbuka di Indonesia**  
**Menurut Pendidikan dan Kategori Pengangguran**  
**Agustus 2023**

Tingkat Pendidikan Terakhir	Kategori pengangguran terbuka				Total
	mencari pekerjaan	mempersiapkan usaha	putus asa/merasa tdk mungkin mendapatkan pekerjaan	sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja	
<=SD	879.121	35.894	366.391	72.291	1.353.697
SMP	906.204	28.204	267.237	45.287	1.246.932
SMU	2.045.599	82.918	287.862	98.102	2.514.481
SMK	1.599.286	35.008	89.673	56.128	1.780.095
Diploma I / II / III	148.056	7.642	7.357	8.842	171.897
D IV/S1/S2/S3	698.299	21.001	34.847	33.826	787.973
<b>Total</b>	<b>6.276.565</b>	<b>210.667</b>	<b>1.053.367</b>	<b>314.476</b>	<b>7.855.075</b>

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2023, diolah Pusdatik Naker

Tabel 6.12  
Pengangguran Terbuka di Indonesia  
Menurut Provinsi dan Kategori Pengangguran  
Agustus 2023

Provinsi	Kategori pengangguran terbuka				Total
	mencari pekerjaan	mempersiapkan usaha	putus asa/merasa tdk mungkin mendapatkan pekerjaan	sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja	
Aceh	117.124	3.075	24.698	12.210	157.107
Sumatera Utara	348.196	62.529	46.689	14.671	472.085
Sumatera Barat	139.613	6.454	25.565	7.873	179.505
Riau	119.821	3.794	2.458	6.381	132.454
Jambi	50.177	1.246	29.457	4.696	85.576
Sumatera Selatan	142.109	3.925	29.358	13.119	188.511
Bengkulu	27.124	937	6.342	3.442	37.845
Lampung	177.023	4.509	16.526	9.184	207.242
Bangka-Belitung	31.093	358	3.439	922	35.812
Kepulauan Riau	63.997	625	8.635	1.073	74.330
DKI Jakarta	305.329	6.519	31.422	11.226	354.496
Jawa Barat	1.517.279	31.418	280.567	59.023	1.888.287
Jawa Tengah	859.372	17.786	159.754	43.348	1.080.260
D I Yogyakarta	52.663	5.575	21.513	2.233	81.984
Jawa Timur	965.745	29.917	132.798	37.127	1.165.587
Banten	413.108	5.129	18.413	11.782	448.432
Bali	59.213	419	8.620	4.169	72.421
Nusa Tenggara Barat	61.649	1.731	11.765	8.098	83.243
Nusa Tenggara Timur	66.979	3.149	16.303	7.384	93.815
Kalimantan Barat	89.579	2.317	48.288	7.390	147.574
Kalimantan Tengah	47.903	2.031	4.885	2.943	57.762
Kalimantan Selatan	72.578	2.548	15.407	3.043	93.576
Kalimantan Timur	89.185	2.696	8.354	3.330	103.565
Kalimantan Utara	12.791	237	1.745	780	15.553
Sulawesi Utara	68.986	1.535	4.150	6.530	81.201
Sulawesi Tengah	34.647	1.526	8.622	2.281	47.076
Sulawesi Selatan	162.051	3.762	24.481	13.206	203.500
Sulawesi Tenggara	28.389	503	12.149	2.853	43.894
Gorontalo	18.843	58	180	823	19.904
Sulawesi Barat	11.350	1.040	3.157	1.726	17.273
Maluku	30.695	1.463	21.882	3.464	57.504
Maluku Utara	23.235	380	3.194	1.791	28.600
Papua Barat	22.961	720	5.549	2.689	31.919
Papua	45.758	756	17.002	3.666	67.182
<b>Total</b>	<b>6.276.565</b>	<b>210.667</b>	<b>1.053.367</b>	<b>314.476</b>	<b>7.855.075</b>

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2023, diolah Pusdatik Naker





# **Bab VII**

## **Bantuan Pemerintah**



Tabel 7. 1 Jumlah Penerima Manfaat Program Kartu Prakerja Menurut Provinsi dan Batch, Tahun 2023

PROVINSI DOMISILI	BATCH																TOTAL
	48 (2)	49 (3)	50 (4)	51 (5)	52 (6)	53 (7)	54 (8)	55 (9)	56 (10)	57 (11)	58 (12)	59 (13)	60 (14)	61 (15)	62 (16)	63 (17)	
ACEH	187	942	1.132	1.532	1.779	2.039	2.001	2.173	1.013	502	2.385	2.490	4.067	828	3019	26.089	
BALI	162	785	955	1.264	664	534	711	343	377	346	778	493	796	587	1082	9.877	
BANTEN	637	3.178	3.788	5.076	5.812	6.496	6.449	6.746	3.344	1.674	7.821	7.961	12.526	2722	9869	84.099	
BENGGKULU	46	229	279	376	448	520	495	558	255	124	606	642	1.165	203	753	6.699	
DI YOGYAKARTA	114	577	687	942	1.037	1.050	1.065	976	550	284	1.292	1.307	1.233	466	1626	13.206	
DKI JAKARTA	451	2.241	2.683	3.597	4.152	5.170	5.169	5.281	2.610	1.355	6.304	6.318	9.260	2206	7874	64.671	
GORONTALO	19	98	116	158	182	258	255	128	119	68	279	168	207	111	322	2.488	
JAMBI	102	517	621	833	966	1.116	1.098	1.183	566	283	1.332	1.365	2.216	462	1682	14.342	
JAWA BARAT	2.542	12.759	15.385	20.534	23.611	26.533	26.278	27.568	13.522	6.837	31.694	32.529	39.303	11237	40644	330.976	
JAWA TENGAH	1.262	6.389	7.707	10.338	11.822	14.345	14.171	14.942	7.294	3.652	17.130	17.626	21.153	6129	22165	176.125	
JAWA TIMUR	1.489	7.480	8.987	11.989	13.754	13.367	13.201	14.037	6.808	3.424	16.006	16.497	25.878	5632	20432	178.981	
KALIMANTAN BARAT	162	804	968	1.277	1.475	1.302	1.376	732	794	431	1.533	1.143	1.355	699	2519	16.570	
KALIMANTAN SELATAN	123	616	742	1.010	1.149	1.143	1.123	922	575	284	1.352	1.301	1.374	475	1736	13.925	
KALIMANTAN TENGAH	74	354	429	570	648	506	602	300	358	184	611	409	487	296	939	6.767	
KALIMANTAN TIMUR	124	632	749	1.009	1.139	969	1.301	688	786	408	1.518	923	1.523	681	1732	14.182	
KALIMANTAN UTARA	19	95	117	135	146	127	178	50	95	53	116	81	72	69	81	1.434	
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	42	220	261	350	397	240	329	176	176	102	355	262	300	173	492	3.875	
KEPULAUAN RIAU	129	631	757	1.002	869	760	907	417	497	296	1.006	660	930	471	1362	10.694	
LAMPUNG	246	1.242	1.500	2.003	2.345	2.861	2.792	3.072	1.426	703	3.368	3.574	6.288	1160	4301	36.881	
MALUKU	70	348	420	493	274	296	345	204	199	179	370	208	293	268	353	4.320	
MALUKU UTARA	29	146	172	146	85	116	109	65	144	96	108	96	96	121	181	1.710	

PROVINSI DOMISILI	BATCH																	TOTAL
	48 (2)	49 (3)	50 (4)	51 (5)	52 (6)	53 (7)	54 (8)	55 (9)	56 (10)	57 (11)	58 (12)	59 (13)	60 (14)	61 (15)	62 (16)	62 (17)		
NUSA TENGGARA BARAT	95	492	587	792	921	1.455	1.409	1.483	721	360	1.677	1.747	1.857	592	2.159	16.347		
NUSA TENGGARA TIMUR	126	631	754	1.017	1.145	1.149	1.123	799	581	293	1.355	1.130	1.327	494	1.764	13.688		
PAPUA	63	51	56	29	20	56	55	3	45	76	52	35	39	56	74	710		
PAPUA BARAT	33	163	72	52	23	37	50	5	28	36	19	14	21	36	53	642		
PAPUA BARAT DAYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	60	51	43	159		
PAPUA PEGUNUNGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	3	1	14		
PAPUA SELATAN	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	9	5	7	6	29		
PAPUA TENGAH	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	1	5	85	148	192	435		
RIAU	174	866	1.048	1.408	1.621	1.827	1.789	1.928	913	459	2.145	2.226	3.602	755	2.742	23.503		
SULAWESI BARAT	20	105	126	170	199	288	283	304	148	72	341	349	435	120	432	3.392		
SULAWESI SELATAN	243	1.233	1.481	1.974	2.269	3.123	3.069	2.148	1.587	808	3.713	3.337	3.944	1.336	4.814	35.079		
SULAWESI TENGAH	57	294	353	470	546	732	715	760	376	186	870	889	1.018	309	1.122	8.697		
SULAWESI TENGGARA	57	279	336	445	507	628	632	492	321	162	749	740	687	270	967	7.272		
SULAWESI UTARA	97	482	585	760	423	368	542	355	271	267	616	475	568	445	1.267	7.521		
SUMATERA BARAT	210	1.053	1.279	1.725	2.005	2.363	2.307	2.467	1.174	579	2.760	2.865	4.597	974	3.534	29.892		
SUMATERA SELATAN	247	1.251	1.502	2.015	2.366	2.827	2.752	3.032	1.402	681	3.324	3.495	5.937	1.133	4.169	36.133		
SUMATERA UTARA	549	2.817	3.366	4.507	5.201	5.399	5.318	5.663	2.720	1.366	6.414	6.622	10.291	2.273	8.249	70.755		
<b>TOTAL</b>	<b>10.000</b>	<b>50.000</b>	<b>60.000</b>	<b>80.000</b>	<b>90.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>51.796</b>	<b>26.632</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>165.000</b>	<b>43.998</b>	<b>154.751</b>	<b>1.272.177</b>		

Sumber: Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, diolah Pusatdik Kemnaker (update 17 Oktober 2023)